



RENCANA STRATEGIS

UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2015-2019





RENSTRA 2015-2019

UIN Alauddin Makassar

RENCANA STRATEGIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
PERIODE TAHUN 2015 - 2019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi

"Intelligence, Enlightenment, Achievement"



DAFTAR ISI

	Hal
Sampul	1
Daftar Isi	3
Kata Pengantar	4
Lembar Pengesahan	5
Ringkasan Eksekutif	7
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemikiran.....	9
B. Perkembangan UIN Alauddin Makassar.....	11
C. Dasar Hukum.....	15
D. Visi, Misi dan Tujuan.....	16
E. Capaian UIN Alauddin.....	19
F. Kondisi Objektif UIN Alauddin.....	22
BAB II POTENSI, PERMASALAHAN, DAN ANALISIS STRATEGIS	
A. Strength (Kekuatan).....	36
B. Weakness (Kelemahan).....	37
C. Opportunity (Peluang).....	38
D. Threat (Ancaman).....	39
BAB III KERANGKA PENGEMBANGAN	
A. Kerangka Pengembangan Universitas.....	41
1. Tahap Strengthening Internal Capacity (2015-2019)	
2. Tahap Improving Performance (2020-2024)	
3. Tahap Comparative Advantages (2025-2029)	
4. Tahap Competitive Advantages (2030-2034)	
5. Tahap Global Recognition (2035-2039)	
B. Kebijakan dan Program Strategis.....	44
1. Alur Perumusan Kebijakan, Proram dan Kegiatan	
2. Kebijakan, Program dan Kegiatan	
BAB IV STRATEGI PEMBIAYAAN	
A. Sistem Alokasi Dana.....	52
B. Distribusi Penggunaan Anggaran menurut Kelompok Kebijakan.....	60
C. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan.....	63
BAB V PENUTUP	
A. Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra.....	69
B. Monitoring dan Evaluasi.....	70

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puja dan puji hanya milik Allah SWT semata. Sholawat dan salam semoga selalu diberikan kepada nabiullah Muhammad SAW. Berkat rahmat dan hidayahNya lah yang memberikan inspirasi kepada tim penyusun sehingga dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar 2015-2019 sesuai rencana semula. Tujuan dari penyusunan RIP ini adalah untuk memberikan arah, petunjuk jalan implementasi, bagi rektor dan sivitas akademika dalam rangka pengembangan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar ke depan yang sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran universitas. Rencana Strategis (Renstra) ini tentunya harus ditindaklanjuti dengan adanya penyusunan Rencana Operasional (Renop) dari masing-masing unit/biro mulai dari tingkat universitas hingga ke tingkat program studi.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat sejumlah poin penting yang perlu diperhatikan oleh semua kalangan terutama dalam penyusunan program kerja atau rencana operasional di setiap lembaga yang ada di UIN Alauddin Makassar. Dengan demikian, seluruh kebijakan yang akan diimplementasikan di tingkat fakultas sejalan dengan rambu-rambu institusi yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan ini, selaku Rektor UIN Alauddin saya menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua civitas akademika, dan khususnya kepada tim penyusun Renstra yang telah meluangkan waktu dan menuangkan gagasannya untuk menyusun Rencana Strategis ini untuk menjadi acuan bersama.

Wassalam

Samata-Gowa, September 2015

Rektor

Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari



Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar 2015 - 2019



KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 235.A
TENTANG
RENCANA STRATEGIS UIN ALAUDDIN
MAKASSAR TAHUN 2015-2019

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** : a. bahwa tim penyusun Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2019 telah selesai menjalankan tugasnya,
b. bahwa untuk pelaksanaan hasil rumusan Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2019 UIN Alauddin Makassar agar memiliki kepastian hukum maka diperlukan surat keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2010 tentang visi kementerian Agama Republik Indonesia
6. Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
7. Keputusan Menteri Agama RI No.93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar,
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330/PMK.05/2008 tanggal 20 November 2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Institusi Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum dengan status Badan Layanan Umum secara penuh;
9. Rencana Induk Pengembangan UIN Alauddin Tahun 2015 s.d.2039
- Memperhatikan** : Laporan hasil kerja Tim Penyusun Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar



MEMUTUSKAN

- Menetapkan :KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG RENCANA STRATEGIS UIN ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN 2015-2019
- Pertama :Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar perlu disosialisasikan
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diperbaiki jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya

Ditetapkan : Samata-Gowa
Pada Tanggal : 21 September 2015

Rektor
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Musafir, M.si
NIP. 195607171986031003

Ringkasan Eksekutif

Dalam kiprahnya sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi selama ini, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar telah menunjukkan eksistensinya sebagai universitas yang patut diperhitungkan secara nasional, terutama di kawasan timur Indonesia dan menjadi kebanggaan civitas akademiknya. Faktor-faktor yang menjadi indikator keberhasilan ini adalah berbagai prestasi dan kinerja para dosen, pegawai, dan mahasiswa serta alumni UIN Alauddin Makassar, dalam karya dan kerja akademik dan non-akademik untuk kepentingan pembangunan bangsa Indonesia. Setiap tahun, UIN Alauddin Makassar telah menghasilkan banyak lulusan yang berprestasi dan dibutuhkan dalam dunia kerja baik di instansi pemerintahan maupun sektor bisnis dan swasta. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah prestasi akademik dosen dalam bentuk penelitian ilmiah, publikasi ilmiah, dan kegiatan-kegiatan pengabdian pada masyarakat yang memiliki dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat.

Kinerja akademik UIN Alauddin Makassar mengalami trend peningkatan sejak bertransformasi status dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) sejak tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005. Dalam perkembangannya, perkembangan positif ini juga didukung oleh perubahan pola pengelolaan keuangan dari status PNBP murni menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KMK.05/2008, pada tanggal 20 November 2008. Status BLU yang sifatnya semi-otonom dalam pengelolaan keuangan ini, memberikan peluang bagi UIN Alauddin Makassar sebagai salah satu PTKIN untuk mampu meningkatkan prestasi dan kinerja akademik yang berkualitas, inovatif, dan kreatif.

Seperti halnya perguruan tinggi lainnya, UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka turut mencerdaskan bangsa, mengangkat martabat dan melestarikan budaya dan kearifan lokal bangsa, serta turut berperan menyelesaikan masalah dan tantangan akademik pada tingkat nasional dan global. UIN Alauddin Makassar berupaya

tampil di depan sebagai agen perubahan (*agent of change*) dalam rangka membangun peradaban dunia berbasis peradaban Islam.

Sebagai salah satu perguruan tinggi Islam, UIN Alauddin Makassar adalah pelopor sekaligus penggerak mengembangkan dan memajukan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dalam rancangan jangka panjang melalui milestones 5 tahunan, UIN Alauddin Makassar berupaya mewujudkan visinya menjadi “Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi) berbasis Peradaban Islam tahun 2039”.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemikiran

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa intisari tujuan pendidikan nasional adalah untuk menumbuhkembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan ini sejalan dengan tuntutan dan harapan masyarakat yang hidup pada era globalisasi saat ini.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, berbagai langkah dilakukan untuk mengetahui sejauh mana institusi dalam kaitan ini UIN Alauddin Makassar melaksanakan peran dan fungsinya di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya, idealnya kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan transparansi semakin hari harus ditingkatkan agar mampu menciptakan dan menghasilkan kualitas institusi yang diharapkan.

UIN Alauddin Makassar memiliki peranan dan fungsi sebagai salah satu perguruan tinggi di Indonesia, yang bertekad menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan di kawasan Timur Indonesia, secara nasional; maupun pada tingkat global. Terlebih dengan transformasi status institusi dari IAIN menjadi UIN tahun 2005, memberi peluang kepada UIN Alauddin Makassar mengambil peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia secara umum.

Peran UIN Alauddin Makassar semakin penting dengan latar belakang tradisi intelektual yang kuat dalam bidang *Islamic Studies* yang merupakan bekal positif dalam mengembangkan keunikan dan keunggulan yang kompetitif (*competitive advantage*) di kancah kompetisi antar perguruan tinggi di Indonesia. Transformasi status menjadi UIN Alauddin Makassar memberikan peluang untuk membuka fakultas dan

program studi umum menjadi salah satu alasan pentingnya UIN Alauddin Makassar memiliki daya saing komparatif (*comparative advantage*) dalam kompetisi di dunia pendidikan, tidak saja dalam negeri tetapi juga di tingkat regional dan global, terlebih dengan pencanangan MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) tahun 2015.

Penguatan peran UIN Alauddin Makassar ini perlu didukung penuh dari pimpinan dan civitas akademika UIN Alauddin Makassar. Untuk itu UIN Alauddin Makassar mencanangkan visi jangka panjang menjadi salah satu Universitas yang bereputasi global. Universitas yang bereputasi global dibangun dari pengakuan global terhadap kinerja akademika UIN Alauddin Makassar yang terukur dan terarah terutama pada beberapa hal. Indikator-indikator tersebut antara lain: a). Kualitas alumni yang dihasilkan; b). Mutu, relevansi, dan manfaat penelitian kaitannya dengan pengembangan ilmu dan menjadi solusi bagi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat; c). Kontribusi konstruktif dari institusi dan civitas akademika yang dapat mendorong perubahan pada aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya secara progresif. Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut maka diperlukan rencana dan langkah-langkah strategis yang sistematis dan kontinu.

Renstra UIN Alauddin Makassar 2015-2019 ini disusun sebagai kelanjutan dari Renstra sebelumnya dan memberikan arah bagi 2 (dua) Renstra periode berikutnya, demi terwujudnya peningkatan yang berkelanjutan (*continuous improvement*). Oleh karena itu, dalam Renstra ini juga diidentifikasi berbagai peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan berdasarkan pada analisis terhadap kondisi eksternal dan internal berjalan yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan program pengembangan UIN Alauddin Makassar 2015-2019.

Sebagai dokumen perencanaan satuan kerja (satker) perguruan tinggi yang bernaung dalam Kementerian Agama, Renstra UIN Alauddin Makassar 2015-2019 disusun dengan mengacu kepada Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Tata Cara Penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006.

Adapun secara substansial, penyusunan Renstra UIN Alauddin 2015-2019 memerhatikan keselarasan antara kebijakan dan program dalam Renstra dengan kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan, yaitu: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025; 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019; 3). Renstra Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi 2015-2019; 4). Renstra Kementerian Agama 2015-2019; 5). Renstra Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam 2015-2019; 6). Renstra ini merupakan revisi dari Renstra UIN Makassar sebelumnya (2013-2018); 7). Master Plan pengembangan UIN Alauddin Makassar; dan 8). Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar tahun 2013.

Dalam kedudukan tersebut di atas, Renstra UIN Alauddin Makassar 2015-2019 berfungsi sebagai pedoman dan bersifat mengikat bagi seluruh unit kerja di lingkup UIN Makassar dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan (*monitoring*)serta evaluasi program dan kegiatan. Selain itu, Renstra ini juga berfungsi sebagai panduan dalam penyusunan Rencana Strategi semua Fakultas, Program Pascasarjana dan lembaga/unit di lingkup UIN Alauddin Makassar.

B. Perkembangan UIN Alauddin Makassar

Perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang sebelumnya bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase yaitu :

1. Fase Permulaan dan Pembentukan/Filial (Tahun 1962 s.d 1965)

Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadi UIN Alauddin Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penergian Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 10 November 1962. Setelah itu penergian Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar pada tanggal 11 November 1964 berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 91 tanggal 7 November 1964. Selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 1965, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Cabang Makassar didirikan berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober 1965.

2. Fase Mandiri (Tahun 1965 s.d 2005)

Pada tanggal 10 November 1965. IAIN Makassar berstatus mandiri berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965. Oebduruab tersebut atas dukungan masyarakat dan pemerintah Sulawesi Selatan serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1963. Peraturan tersebut menegaskan antara lain bahwa sekurang-kurangnya tiga jenis fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri. Pada saat itu, IAIN Makassar telah mempunyai tiga fakultas yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan Fakultas Ushuluddin.

Nama "Alauddin" pada IAIN di Makassar diambil dari nama raja Kerajaan Gowa yang pertama memeluk Islam dan memiliki latar belakang sejarah pengembangan Islam. Di samping itu, nama ini mengandung harapan peningkatan kejayaan Islam di masa

mendatang di Sulawesi Selatan pada khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Sultan Alauddin adalah raja Gowa XIV tahun 1593-1639, (kakek/datok) dari Sultan Hasanuddin Raja Gowa XVI, dengan nama lengkap I Mangnga'ranggi Daeng Manrabbia Sultan Alauddin. Gelar Sultan Alauddin diberikan kepada Raja Gowa XIV ini, karena dialah Raja Gowa yang pertama kali menerima agama Islam sebagai agama kerajaan. Ide pemberian nama "Alauddin" kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama dicetuskan oleh para pendiri IAIN "Alauddin", diantaranya adalah Andi Pangeran Daeng Rani, (cucu/turunan) Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi Selatan, dan Ahmad Makkarasau Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.

Pada Fase ini, IAIN (kini UIN) Alauddin yang semula hanya memiliki tiga (3) buah Fakultas, berkembang menjadi lima (5) buah Fakultas ditandai dengan berdirinya Fakultas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967 Tanggal 23 November 1967. Disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 253 Tahun 1971. Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar. Tahun 1990 Program Pascasarjana (PPs) didirikan berlandaskan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan keputusan Menteri Agama RI No. 403 Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.

3. Fase Perubahan Status/Konversi (Tahun 2005 s.d sekarang)

Perubahan status kelembagaan dari Institut menjadi Universitas diperlukan untuk; pertama, merespon tuntutan perkembangan ilmu

pengetahuan dan perubahan mendasar atas lahirnya Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun 1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang pendidikan menengah; kedua, untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I. Atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun 2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan presmian penandatanganan prasasti oleh Presiden RI Bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Desember 2005 di Makassar.

Dengan perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN Alauddin Makassar berkembang dari lima (5) buah Fakultas menjadi tujuh (7) buah Fakultas dan satu (1) buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:

- a. Fakultas Syari'ah dan Hukum
- b. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
- c. Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
- d. Fakultas Adab dan Humaniora
- e. Fakultas Dakwah dan Komunikasi

- f. Fakultas Sains dan Teknologi
 - g. Fakultas Ilmu Kesehatan
 - h. Program Pascasarjana(PPS)
4. Pejabat Rektor dari Fase 1965 s.d sekarang
- Sejak berdirinya, IAIN “Alauddin” Makassar sampai berubah status menjadi UIN Alauddin (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor dan Rektor sebagai berikut:
1. Haji Areppala, selaku Kuasa/Pejabat Rektor Pertama (1965 – 1967)
 2. Drs. H. Muhyiddin Zain, Rektor , tahun (1967-1972)
 3. Prof. H. Abdurrahman Syihab, Rektor, tahun (1972-1979)
 4. Drs. H. A. Moerad Oesman, Rektor, tahun (1979-1985)
 5. Dra. H. A. Rasdianah, Rektor, tahun (1985-1994)
 6. Drs. H. M Shaleh A. Putuhena, Rektor tahun (1994-1998)
 7. Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim, Rektor, (1998-2002)
 8. Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA, Rektor, (2002-2010)
 9. Prof. Dr. H. Abd. Qadir Gassing HT, MS (2010-2015)
 10. Prof. Dr. H. Musafir, M.Si (2015-2019)

C. *Dasar Hukum*

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
4. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
9. Peraturan Presiden RI Nomor 57 tahun 2007 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin Makassar ke UIN Alauddin Makassar
10. Peraturan Menteri Agama (PMARI) Nomor 13 tahun 2013 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 85 tahun 2017 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2014 Jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 8 tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 349 tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam

D. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Kementerian Agama Tahun 2015-2019 adalah:

**“Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun,
cerdas, dan sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan
Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong royong”**

Visi Pendidikan Tinggi Islam dirumuskan sebagai berikut:

**“Mewujudkan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam
Sebagai Rujukan Dunia”**

Visi UIN Alauddin Makassar pada tahap 2015- 2040 dirumuskan sebagai berikut:

**“Menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK (ilmu
pengetahuan dan teknologi) Berbasis Peradaban Islam tahun
2039”**

Sebagai penjabaran dari visi tersebut, UIN Alauddin Makassar mengemban misi sebagai berikut:

1. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, dan teknologi (Iptek).
3. Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.

Pelaksanaan dan pencapaian misi UIN Alauddin Makassar tersebut di atas pada tingkat yang lebih teknis dan operational dapat lebih mudah dilaksanakan apabila diuraikan dalam tujuan pengembangan berikut ini:

1. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni.
2. Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat

secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik.

3. Menghasilkan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang Islami.
4. Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik (*Good University Governance*) pada semua level manajerial institusi.

Skema berikut menggambarkan secara utuh keterkaitan Visi, Misi, dan tujuan pengembangan UIN Alauddin Makassar:

Tabel Visi, Misi, dan Tujuan

V I S I	UIN Alauddin Makassar menjadi Pusat Pencerahan dan Transformasi IPTEK Berbasis Peradaban Islam tahun 2040			
	1	2	3	
M I S I	Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.	Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (Ipteks).	Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju universitas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.	
	1	2	3	
	1	2	3	4

T U J U A N	Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang pendidikan dan pengajaran yang berpengaruh terhadap peningkatan mutu dan kompetensi alumni	Menghasilkan dan meningkatkan kinerja akademik bidang penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian pada masyarakat secara sinergis untuk meningkatkan mutu dan daya saing akademik	Menghasilkan, meningkatkan, dan membangun koordinasi dan sinergitas antar unit dan lembaga untuk menguatkan struktur dan budaya organisasi yang Islami .	Menghasilkan dan meningkatkan penegakan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik (<i>Good University Governance</i>) pada semua level manajerial institusi
--	--	--	--	---

E. Capaian UIN Alauddin

Periode Tahun 2002-2006/2006-2010

1. Pembentukan Unit Penjaminan Mutu Akademik Universitas tahun 2002 dan ditingkatkan status kelembagaan tahun 2007 menjadi Pusat Peningkatan dan Penjaminan Mutu.
2. Pelatihan dan pengangkatan Auditor Mutu Akademik Internal (AMAI) sebanyak 30 orang tahun 2008/2009.
3. Pembangunan Kampus 2 sejumlah 14 gedung berlantai 4 seluas 39 Ha bersamaan dengan pembangunan Training Center dengan sentuhan hotel 7 lantai atas biaya *Islamic Development Bank* (IDB).
4. Pengajuan usul konversi IAIN menjadi UIN yang terwujud dalam SK Preiden RI No 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) dengan Penambahan Fakultas Sains dan Teknologi (FST) dan Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK). Selain itu, penggabungan beberapa program studi umum pada fakultas yang telah ada sebelumnya.
5. Pembukaan Program Doktor Pascasarjana IAIN Alauddin tahun 2003 dengan Program Studi Dirasah Islamiyah dengan beberapa konsentrasi.
6. Awal Sertifikasi Dosen dan pembayaran tunjangan sertifikasi tahun 2008.
7. Penggunaan/Perpindahan ke kampus 2 dari kampus 1 secara administratif dan menyeluruh.

8. Penyusunan, workshop dan pemberlakuan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2003.
9. Penerapan sistem informasi UIN Alauddin secara online melalui website.
10. Pengelolaan keuangan UIN Alauddin dengan sistem BLU (Badan Layanan Umum).

Periode Tahun 2010-2015

1. Program Gerakan Seribu Buku (GSB) mulai tahun 2011 s/d 2015 tercapai sebanyak 1000 judul buku.
2. Penerbitan pedoman-pedoman a.l.: Pedoman Edukasi yang disempurnakan dan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (PPKTI).
3. Belakunya Ortaker UIN Alauddin dengan PMA No. 25 Tahun 2013 Jo PMA No. 85 Tahun 2013 yang tindak lanjutnya dengan pelantikan pejabat sesuai nomenklatur dalam ortaker tersebut.
4. Pengangkatan pertama dosen kontrak sebanyak 133 orang.
5. Penyusunan kurikulum dan silabus matakuliah yang mengakomodir tuntutan integrasi keilmuan sebagai realisasi dari konversi/perubahan status IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin.
6. Penguatan dan pelatihan Audit Mutu Akadmik Internal (AMAI) yang melahirkan sebanyak 250 orang auditor internal UIN Alauddin.
7. Peningkatan akreditasi universitas dari akreditasi C menjadi B tahun 2014, akreditasi program studi dari B menjadi A sebanyak 5 prodi, dan akreditasi C ke B sebanyak 38 Program Studi dengan sistem pendampingan oleh LPM pada saat penyusunan borang dan visitasi oleh asesor BAN-PT.
8. Pencanaan integrasi keilmuan mahasiswa Tahun 2013.
9. Penguatan kemampuan meneliti para dosen melalui kegiatan pencangkakan penelitian.
10. Penguatan berbagai jenis penelitian dengan peningkatan pembiayaan, seperti penelitian unggulan dan penelitian kolaboratif.
11. Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan.
12. Pengusulan dan pembukaan Profesi Ners.
13. Pengusulan dan pembukaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi).
14. Pembentukan Satuan Pemeriksa Internal (SPI) UIN Alauddin Makassar sebagai era baru pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
15. Pembentukan dan penguatan Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) sebagai unit usaha UIN Alauddin Makassar.

16. Penerapan dan pemberlakuan tunjangan kinerja bagi PNS Administrasi.
17. Pelaksanaan kegiatan workshop Islam untuk Disiplin Ilmu (IDI) dalam rangka penguatan pemahaman integrasi keilmuan di kalangan dosen UIN Alauddin.
18. Pembentukan dan penguatan Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) sebagai unit usaha UIN Alauddin.
19. Mendapatkan akreditasi ISO 9001:2008 untuk Pascasarjana dan Bagian Akademik UIN Alauddin Makassar.
20. Launching GSB dan penerimaan penghargaan dari MURI sebagai Perguruan Tinggi yang menyusun dan menggandakan buku dalam jumlah terbanyak.

Periode Tahun 2015-2019

1. Pengusulan Prodi Pendidikan Dokter 2015.
2. Pembukaan Prodi Pendidikan Dokter sekaligus penerimaan mahasiswa baru sebanyak 50 orang pada tahun 2016.
3. Penambahan gedung/ruang kuliah atas bantuan SBSN sebanyak 3 gedung dengan 72 ruang kuliah.
4. Penambahan gedung/ruang kerja dosen atas bantuan SBSN sebanyak 2 gedung.
5. Pengangkatan Dosen Tetap Bukan PNS sebanyak 113 orang.
6. Penguatan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) UIN Alauddin.
7. Pelaksanaan Gerakan Pembaruan Pembelajaran (GPP) yang diawali dengan penyusunan dan penetapan sistem pembelajaran UIN Alauddin Makassar yang disebut dengan STILeS (Student-Teacher Integrated Learning System).
8. Pelaksanaan orientasi sistem pembelajaran UIN Alauddin dan penyusunan modul pembelajaran STILeS bagi dosen UIN Alauddin.
9. Tersusunnya modul pembelajaran STILeS matakuliah, baik modul untuk dosen maupun modul untuk mahasiswa.
10. Melanjutkan pembangunan Rumah Sakit Pendidikan.
11. Pengusulan Program Studi Profesi Apoteker.
12. Penguatan SPI dalam pelaksanaan evaluasi manajemen dan tugas PNS.
13. Rencana pelaksanaan remunerasi PNS administrasi secara utuh dan PNS dosen yang mendapat tugas tambahan, serta remunerasi aktivitas bagi dosen PNS.
14. Perubahan logo IAIN menjadi logo baru.

F. Kondisi Objektif UIN Alauddin

1. Bidang Pendidikan, Pengajaran, dan Kurikulum

UIN Alauddin menyelenggarakan jenjang pendidikan tinggi yang meliputi program Diploma, Sarjana, Magister, dan Doktor. Selain itu, juga menyelenggarakan program Profesi. Setiap jenjang pendidikan itu memiliki program studi. Fakultas menyelenggarakan program Sarjana dengan berbagai jenis program studi di dalamnya. Fakultas juga dapat menyelenggarakan program Magister dan program Doktor. Pascasarjana menjalankan program Magister dan program Doktor yang berbasis Islam. Untuk sementara program Magister dan program Doktor yang berbasis program studi umum diselenggarakan secara bersama-sama antara fakultas dan Pascasarjana. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran mengacu pada ketentuan nasional yang sudah baku dengan sistem SKS yang memberi beban setiap jenjang pendidikan itu dengan jumlah SKS dan beban belajar paling lama 7 tahun untuk program Sarjana, 4 tahun untuk program Magister dan 7 tahun untuk program Doktor. Kurikulum yang dilaksanakan berbasis Kerangka Kurikulum Nasional Indonesia (KKNi) yang dilaksanakan secara bertahap sampai pada waktu yang ditentukan untuk dilaksanakan secara murni dan utuh. Revisi kurikulum dilaksanakan sesuai dengan perkembangan pasar dan Iptek.

2. Bidang Penelitian dan Publikasi

Pelaksanaan penelitian merujuk kepada ketentuan nasional sambil mengakomodasi perkembangan kearifan lokal di UIN Alauddin Makassar. Penelitian dilakukan bersama antara fakultas melalui program studi dengan pusat penelitian dan publikasi pada LP2M sebagai koordinator. Berbagai jenis penelitian telah dan terus akan dilakukan sesuai perkembangan keuangan dan kebutuhan menuju universitas riset. Jenis penelitian itu mengikuti penelitian unggulan, penelitian kolaboratif, penelitian mandiri, penelitian kelompok, dan lain-lain sebagainya. Unsur publikasi ilmiah terus dikembangkan melalui penerbitan jurnal terindeks sebagai langkah permulaan baik jurnal lokal, nasional, dan internasional. Pada waktu yang bersamaan digalakkan pula publikasi ilmiah terakreditasi nasional dan bereputasi internasional. Publikasi ilmiah juga dilakukan para

dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan baik jurnal yang ada di UIN Alauddin maupun jurnal di luar UIN Alauddin Makassar.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang selama ini hanya bertumpu pada pelaksanaan KKN dan desa binaan/desa mitra juga dilakukan dengan beberapa cara berdasarkan hasil kerjasama dengan pihak Kanada melalui proyek SILE (Supporting Islamic Leadership Education) dengan metode ABCD (Asset Based Community Development) hasil kerja sama itu dilanjutkan dengan pembentukan kelompok kerja pada lokasi yang dijadikan percontohan atau *pilot project*.

Pengabdian kepada masyarakat selain dilakukan kelembagaan melalui Pusat Pengabdian kepada Masyarakat juga dilakukan secara rutin dan terstruktur oleh para civitas akademik (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa). Jenis-jenis pengabdian dapat bervariasi melalui penyuluhan, ceramah, khutbah, dan praktik keilmuan. Hal ini dilakukan secara individual walaupun diantara kegiatan itu ada pula yang dilakukan secara terstruktur.

4. Bidang Sumber Daya Manusia

Perguruan tinggi dibangun dimaksudkan untuk peningkatan mutu lulusan, itulah sebabnya seluruh kegiatan tridarma perguruan tinggi diarahkan untuk penguatan prodi. Endingnya adalah kualitas alumni sebagai ujung tombak penguatan keberhasilan sebuah perguruan tinggi.

Dosen tetap UIN Alauddin terdiri dari dua jenis yaitu dosen tetap PNS dan dosen tetap bukan PNS. Dosen tetap ini bervariasi jumlahnya tergantung pada jumlah mahasiswa pada setiap fakultas. Kualitas dosen PNS sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah tentang rekrutmen dosen PNS yang berupaya menyeimbangkan antara kuantitas dan kualitas untuk menghasilkan outcome (hasil capaian).

Peralihan jabatan fungsional dosen sangat tergantung pada seberapa jauh para dosen mengumpulkan kredit poin. Hal ini terlihat pada jenjang jabatan fungsional dosen yang tertinggi yaitu profesor. Pada level profesor ini sangat sulit mengejar capaian jumlah minimal profesor. Selain pengurusan yang semakin diperketat juga tingkat kesulitan menulis pada jurnal terakreditasi.

Data Dosen Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

No	Fakultas	Jenis Kelamin		JML	Tingkat Pendidikan			JMI
		L	P		S.1	S.2	S.3	
1	Fak. Ilmu Kesehatan	14	50	64	2	54	8	64
2	Fak. Sains & Teknologi	24	38	62	0	47	15	62
3	Fak. Adab & Humaniora	31	22	53	0	33	20	53
4	Fak. Dakwah & Komunikasi	38	22	60	0	27	33	60
5	Fak. Syariah & Hukum	50	21	71	0	31	40	71
6	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	27	9	36	0	22	14	36
7	Fak. Tarbiyah & Keguruan	68	39	107	0	48	59	107
8	Fak. Ushuluddin & Filsafat	33	21	54	0	27	27	54
9	DPK	38	17	55	0	30	25	55
	Total	323	239	562	2	319	241	562

Adapun dosen tetap bukan PNS ditetapkan pada tahun 2017 sesuai dengan KMA No. 3 Tahun 2016. Sehingga UIN alauddin telah mengangkat dosen kontrak sejak Februari 2013 sebanyak 133 orang terutama untuk program studi baru yang dosen tetap PNSnya masih sangat minim. Berdasarkan kebijakan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI UIN Alauddin Makassar diberikan kuota dosen bukan PNS sebanyak 113 orang. Selain dosen tetap, setiap fakultas UIN Alauddin mengangkat dosen tidak tetap.

Data Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Fakultas	Jabatan Fungsional					Jumlah
		Guru Besar	Lektor Kepala	Lektor	Asisten Ahli	Cados	
1	Fak. Ilmu Kesehatan	0	4	45	13	2	64
2	Fak. Sains & Teknologi	0	8	44	10	0	62
3	Fak. Adab & Humaniora	3	25	19	6	0	53
4	Fak. Dakwah & Komunikasi	4	34	19	3	0	60
5	Fak. Syariah & Hukum	11	35	19	4	2	71
6	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	3	10	18	4	1	36
7	Fak. Tarbiyah & Keguruan	7	59	33	6	2	107
8	Fak. Ushuluddin & Filsafat	9	28	14	0	3	54
9	DPK	2	20	33	0	0	55
	Total	39	223	244	46	10	562

Tenaga kependidikan

Ada dua kategori tenaga kependidikan yaitu tenaga kependidikan tetap (PNS) dan tenaga kependidikan non PNS (honorar). Tenaga kependidikan PNS terdiri atas beberapa unsur yaitu tenaga administrasi, tenaga laboran, pustakawan, dan arsiparis. Demikian juga tenaga kependidikan honorar terdiri atas tenaga administrasi, tenaga laboran, tenaga pustakawan, tetapi tidak ada honorar untuk tenaga arsiparis. Tenaga bantu lainnya yaitu satuan pengaman sebagai tenaga kontrak Cleaning Service (Pelayanan Kebersihan) yang dipihak ketigakan.

Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Tenaga Kependidikan	Jenis Kelamin		Jml
		L	P	
1	Biro Administrasi Umum	42	18	60
2	Biro AAKK	29	22	51
4	Fak. Ilmu Kesehatan	5	9	14
5	Fak. Sains & Teknologi	11	11	22
6	Fak. Adab & Humaniora	6	3	9
7	Fak. Dakwah & Komunikasi	8	6	14
8	Fak. Syariah & Hukum	2	9	11
9	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	4	8	12
10	Fak. Tarbiyah & Keguruan	11	8	19
11	Fak. Ushuluddin & Filsafat	5	7	12
	Total	123	101	224

Tenaga kependidikan PNS dapat menduduki jabatan struktural mulai dari Eselon IV sampai dengan Eselon II. Jabatan Eselon II dalam hal ini Kepala Biro diangkat melalui mekanisme lelang jabatan ditingkat Kementerian Agama Pusat. Untuk jabatan Eselon III dan IV melalui mekanisme Baperjakat. Apabila seorang etnaga

kependidikan bermaksud menduduki jabatan struktural itu, maka setiap tenaga kependidikan yang memenuhi syarat kepangkatan berhak mengikuti asesmen yang diadakan khusus untuk itu.

Data Tenaga Kependidikan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

		Tingkat Pendidikan								Jml
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S.1	S.2	S.3	
1	Biro Administrasi Umum	2	3	15	1	0	19	20	0	60
2	Biro AAKK	0	0	4	1	2	26	18	0	51
4	Fak. Ilmu Kesehatan	0	0	1	0	1	5	7	0	14
5	Fak. Sains & Teknologi	0	1	1	0	0	15	5	0	22
6	Fak. Adab & Humaniora	0	0	2	0	0	5	2	0	9
7	Fak. Dakwah & Komunikasi	0	0	1	0	0	11	2	0	14
8	Fak. Syariah & Hukum	0	0	3	0	0	6	2	0	11
9	Fak. Ekonomi & Bisnis Islam	0	0	4	0	1	4	3	0	12
10	Fak. Tarbiyah & Keguruan	0	0	3	0	0	9	6	1	19
11	Fak. Ushuluddin & Filsafat	0	0	2	0	0	7	3	0	12
	Total	2	4	36	2	4	107	68	1	224

5. Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

Sejak IAIN Alauddin berubah status menjadi UIN Alauddin Makassar, perkembangan mahasiswa mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Faktor utamanya disebabkan oleh terbukanya ruang berkompetisi bagi calon mahasiswa pada program studi umum. Disamping disebabkan oleh peningkatan jumlah kenaikan penduduk.

Bandingkan dengan penduduk era 1980an berkisar 150 juta jiwa dengan kondisi pada tahun 2018 ini yang mencapai angka 255 juta jiwa. Peningkatan Jumlah pendaftar tahun 2015 yang mencapai 67.000 dengan daya tampung 5000 orang tahun 2016 mencapai 500 ribu orang dengan daya tampung 5000 orang.

UIN Alauddin Makassar menyelenggarakan wisuda 3 kali setahun, yaitu periode April, Agustus, dan Desember. Jumlah mahasiswa setiap periode mencapai 1200 sampai dengan 1400 orang yang dilaksanakan dalam dua hari.

6. Bidang Administrasi Keuangan

Kondisi keuangan tahun 2017 sebagai pendanaan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu;

1.	Usaha Bisnis	= Rp 1.200.000.000,-
2.	SPP Mahasiswa	= Rp 47.805.409.000,-
3.	Hasil Kerjasama	= Rp 1.076.239.845,-
4.	Dana DIPA	= Rp 298.131.640.000,-
5.	Investasi Keuangan	= <u>Rp 40.000.000.000</u>
		Rp 388.213.288.845,-

Usaha bisnis masih terbatas pada pengelolaan Training Centre sebagai tempat pesta, penginapan, seminar, dan loka karya, usaha sewa tempat untuk kafe, kios, warung, dan lain-lain. Usaha-usaha bisnis lainnya masih sementara penajakan misalnya peternakan melalui fakultas SAINTEK, pengelolaan poliklinik telah berjalan, sedangkan Rumah Sakit pendidikan belum beroperasi. Upaya pengembangan usaha perkoperasian masih sebatas untuk kesejahteraan pegawai. Sedang diupayakan usaha pengolahan air mineral untuk mensuplai kegiatan sehari-hari di kampus. Sumber lain yang sedang dirintis yaitu Pembangunan *bisnis centre*, jasa perparkiran, serta jasa *washing car*.

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2016, UIN Alauddin diberi kepercayaan mengelola anggaran dengan sistem Badan Layanan Umum (BLU). Memasuki Januari 2017 pengelolaan keuangan dengan sistem remunerasi.

7. Bidang Sarana dan Prasarana

a. Lahan dan bangunan

- 1) UIN Alauddin memiliki lahan berupa tanah dan bangunan yang menjadi kampus I terletak di jalan Sultan Alauddin Gunung Sari No. 6 dengan luas 6,5 ha
- 2) Kampus II UIN Alauddin Jl. HM. Yasin Limpo seluas 39 ha
- 3) Tanah di jalan Sultan Alauddin samping Lapas Makassar
- 4) Tanah di jalan Tala' Salampang
- 5) Tanah di Bulukumba Ex kampus Fakultas Dakwah
- 6) Tanah di Ponpes Al Hidayah Malino Gowa
- 7) Tanah 7 ha di Pao-Pao Bontotangnga Gowa

b. Perpustakaan

- c. Laboratorium
 - d. Asrama Mahasiswa
 - e. Sarana Olahraga
 - f. Kantin
 - g. Tempat Ibadah
8. Bidang Kelembagaan

UIN Alauddin Makassar memiliki delapan fakultas dan Pascasarjana yang masing-masing membawahi Jurusan/Prodi. Kedelapan fakultas tersebut meliputi Fakultas Syariah dan Hukum (FSH), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Ilmu Politik (FUF), Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK), serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

Pascasarjana Program Magister dan Doktor dipimpin oleh Direktur bersama Wakil Direktur. Pascasarjana Program doktor (S3) Dirasah Islamiyah dengan sembilan Konsentrasi masing-masing Tafsir Hadist, Pemikiran Islam, Syariah/Hukum Islam, Pendidikan dan Keguruan, Sejarah Peradaban Islam, Dakwah dan Komunikasi, Pendidikan Bahasa Arab, Bahasa dan Sastra Arab, Ekonomi Islam. Sementara itu, Program Magister (S2) terdiri atas beberapa Prodi yaitu Prodi Tafsir Hadist, Prodi Pemikiran Islam, Prodi Syariah/Hukum Islam, Prodi Pendidikan dan Keguruan, Prodi Sejarah Peradaban Islam, Prodi Dakwah dan Komunikasi, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Prodi Bahasa Arab, Prodi Ekonomi Islam Serta Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pascasarjana dilengkapi dengan perpustakaan dan *Learning Centre*. Pascasarjana UIN Alauddin Makassar menetapkan visi yaitu “menjadi pusat kajian sumber islam bagi masalah pluralitas masyarakat, bangsa, dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk transformasi masyarakat.” Untuk mewujudkan visi tersebut, Pascasarjana merumsukan misi (1) menyelenggarakan program pendidikan jenjang magister dan doktor dalam bidang kajian sumber kajian yang berwenang konferensif, responsif, dan transformatif, (2) menghasilkan tenaga-tenaga terpelajar berkualifikasi magister dan doktor, berkompeten dalam lingkup dirasah islamiah (*Islamic studies*) dan bidang keilmuan lainnya, dengan penguasaan metodologis dan pendekatan keilmuan guna mengembangkan ilmu pengetahuan

didalam berkhitmat bagi kemajuan peradaban bangsa, dan (3) melahirkan tenaga-tenaga terpelajar berwawasan keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan yang luas dan terbuka serta memiliki kemampuan aplikatif ilmu pengetahuan dengan kepekaan yang cerdas terhadap tuntutan perubahan sosial.

Fakultas Syariah dan Hukum (FSH) dipimpin oleh Dekan dibantu para wakil dekan dengan membawahi enam Jurusan. Visi Fakultas Syariah dan Hukum adalah pusat riset dan pencerahan yang unggul dalam ilmu syariah dan hukum ber peradaban Islam dengan misi (1) melaksanakan pembelajaran dan pengabdian berbasis riset, (2) meningkatkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertaraf nasional dan internasional, menjadi rujukan dalam pengembangan peradaban Islam, (3) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kerja fakultas, (4) memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra fakultas, dan (5) membangun organisasi yang sehat dengan menerapkan manajemen akreditasi, penjamin mutu, dan evaluasi diri secara berkesinambungan, dengan prinsip, transparansi, otonomi, dan akuntabilitas. Adapun Jurusan/Prodi yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum adalah Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan; Jurusan Hukum Peradilan & Kekeluargaan; Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan, Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum, dan Jurusan Ilmu Hukum. Sementara dua prodi lainnya yang baru terbentuk adalah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Jurusan Ilmu Falak. Untuk mendukung segala aktivitas mahasiswa, fakultas ini dilengkapi dengan Laboratorium Multimedia, Laboratorium Yustisi, Laboratorium Falak, Perpustakaan Fakultas, Klinik Hukum serta Lembaga Bantuan Hukum.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) memiliki visi yaitu terwujudnya pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan Islam, Kependidikan dan Keguruan yang terakreditasi A dalam waktu 5 tahun ke depan. Untuk menerjemahkan visi di atas, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan merumuskan misi sebagai berikut: (1) melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berbasis mutu dalam keilmuan dan keislaman, (2) mengembangkan ilmu-ilmu kependidikan dan keguruan yang integratif dan holistic, (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan

mengembangkan sikap ilmiah, keterampilan, dan aplikasi nilai-nilai akhlak mulia, (4) mengembangkan jaringan kemitraan dengan lembaga-lembaga terkait baik, regional, nasional, dan internasional, (5) meningkatkan mutu layanan administrasi, akademik, dan kemahasiswaan berbasis IT, (6) meningkatkan mutu dan citra mahasiswa sebagai manusia akademik yang berkepribadian Islami dan berorientasi keilmuan, (7) meningkatkan mutu input dan output Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, (8) meningkatkan pemberdayaan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan.

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK) dipimpin oleh seorang dekan dibantu oleh tiga orang wakil dekan. FTK memiliki jurusan/Program studi sebagai berikut: (1) Jurusan Pendidikan Agama Islam, (2) Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, (3) Jurusan Kependidikan Islam, (4) Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, (5) Jurusan Pendidikan Matematika, (6) Jurusan Pendidikan Fisika, (7) Jurusan Pendidikan Biologi, dan (8) Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidayah. Disamping itu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan sebagai LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) di berikan amanah untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peningkatan kualitas guru baik sertifikasi guru maupun peningkatan kualifikasi ke jenjang strata satu.

Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik (FUF) dipimpin oleh dekan didampingi oleh wakil dekan 1, 2 dan 3. Fakultas ini memiliki visi menjadi Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik yang terkemuka dalam transformasi keilmuan. Misi FUF adalah (1) meningkatkan peran fakultas sebagai pusat keunggulan (*center of excellence*) dan exponen utama transformasi intelektual, (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kamapanan integrasi, sinergi, dan harmoni anantara nilai-nilai agama, dan (3) menjalin hubungan yang sinergi dan harmoni secara internal dikalangan civitas akademika dengan tetap memprioritaskan pembangunan spirit dan tradisi intelektual maupun secara eksternal dengan lembaga-lembaga keilmuan dengan sosial kemasyarakatan untuk mewujudkan peradaban Islam yang berkerahmatan. Fakultas Ushuluddin, Filsafat, dan Politik memiliki program studi sebagai berikut: (1) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Akidah, (2) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Filsafat Agama, (3) Jurusan/Prodi Studi Ilmu al-Quran

dan Tafsir, (4) Jurusan/Prodi Studi Sosiologi Agama, (5) Jurusan/Prodi Studi Perbandingan Agama, (6) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Politik, (7) Jurusan/Prodi Studi Ilmu Hadis.

Fakultas Adab dan Humaniora (FAH) dipimpin oleh Dekan bersama tiga orang Wakil Dekan. Fakultas Adab dan Humaniora membawahi empat jurusan. Masing-masing Jurusan Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Jurusan Bahasa dan Sastra Arab (BSA); Bahasa dan Sastra Inggris (BSI); serta Jurusan Ilmu Perpustakaan. Visi FAH adalah unggul dalam pengintegrasian dan pengembangan studi keislaman dan keadaban dengan misi (1) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter entrepreneurship, yang bersendikan keharmonisan dan berakhlak mulia, (2) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal di bidang akademik, (3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdisiplin tinggi, baik disiplin waktu, disiplin aturan, maupun disiplin kerja, dan (4) menghasilkan kontribusi yang “determinan” bagi kemandirian bangsa dalam persaingan global. Untuk mendukung penuh pelayanan dan aktivitas mahasiswa fakultas ini dilengkapi dengan Laboratorium Bahasa Arab, Laboratorium Bahasa Inggris, Laboratorium Multimedia, Perpustakaan, serta Museum sejarah.

Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) merupakan Fakultas yang dipimpin oleh Dekan bersama dengan wakil Dekan. Visi FDK yaitu sebagai pusat pengembangan akademik khususnya dalam kajian ilmu dakwah dan ilmu komunikasi yang dilandasi dengan nilai-nilai akhlaq al-karimah yang dijiwai oleh al-Quran dan sunnah. Adapun misi FDK adalah (1) mengembangkan kualitas akademik dalam bidang profesional yang dilandasi oleh semangat uswatun hasanah, (2) mengembangkan potensi dan kapasitas keilmuan dakwah dan komunikasi ke arah terwujudnya sarjana muslim yang cerdas, professional, terampil bertanggung jawab dan memiliki akhlaq al-karimah, dan (3) mewujudkan sarjana dakwah dan komunikasi yang berdaya saing tinggi, berperadaban dalam bidang dakwah dan komunikasi. Fakultas ini membawahi tujuh jurusan masing-masing Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam; Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam; Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam; Jurusan Kesejahteraan Sosial; Jurusan Manajemen Dakwah; Jurusan Jurnalistik; Jurusan Ilmu Komunikasi dan sebuah jurusan baru yaitu Jurusan Manajemen Haji dan Umrah.

Fakultas ini dilengkapi dengan beberapa laboratorium seperti laboratoium Penyiaran, dan beberapa laboratorium lain serta sebuah perpustakaan

Fakultas Sains dan Teknologi (FST) bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang sains dan teknologi yang terintegrasi dengan ilmu keislaman dengan visi menjadi pusat pencerahan dan transformasi IPTEKS berdasarkan pradaban Islam. Misi FST yaitu (1) menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat, (2) menyelenggarakan kegiatan pnedidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran islam dengan ilmu pengetahuan teknologi dan seni (IPTEKS), dan (3) mewujudkan Universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju Universitas riset dengan pengembangan nilai spiritual dan tradisi keilmuan. Fakultas Sains dan Tekhnologi dibawah pimpinan Dekan dan Wakil Dekan memiliki sembilan Jurusan/Prodi. Sembilan Jurusan tersebut yaitu Jurusan Teknik Arsitektur; Jurusan Teknik Informatika; Jurusan Teknik perencanaan wilayah dan kota; Jurusan Biologi; Jurusan Fisika; Jurusan Kimia; Jurusan Matematika; Jurusan Ilmu Peternakan; serta Jurusan Sistem Informasi. Masing-masing prodi memiliki laboratorium praktikum diantaranya laboratorium Biologi, laboratorium Fisika dan lain-lain.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) yang merupakan salah satu fakultas terbaru di UIN Alauddin Makassar dipimpin oleh seorang Dekan didampingi oleh wakil dekan 1, 2 dan tiga dengan membina lima Jurusan/Prodi tingkat sarjana dan diploma. Jurusan/prodi tersebut yakni Jurusan Kesehatan Masyarakat; Jurusan Keperawatan; Jurusan Farmasi; Prodi Kebidanan (D3); serta satu Jurusan/prodi terbaru yaitu Ilmu Kedokteran. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang ilmu kesehatan yang terintegrasi dengan ilmu keislaman dengan visi sebagai pusat pencerahan dan transformasi ilmu kesehatan berbasis Islam. Misi yang dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut adalah (1) menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas kehidupan masyarakat, (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian

kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran islam dengan ilmu kesehatan, dan (3) meningkatkan fakultas ilmu kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertata kelola baik dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan kondisi keilmuan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) bertujuan menghasilkan lulusan yang ahli dan profesional dalam bidang ekonomi dengan ilmu keislaman dengan visi menjadikan program studi ekonomi islam mempunyai keunggulan akademik dan daya kompetitif secara global yang dijiwai nilai-nilai keislaman serta menjadi pusat pengembangan ekonomi umat, khususnya di Indonesia Timur. Misi FEBI adalah (1) mengembangkan ekonomi berdasarkan epistemologi, antropologi, dan aksiologi Islam, (2) menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kegiatan penelitian baik penelitian teoritis maupun penelitian terapan ekonomi yang dilandasi moral dan nilai-nilai keislaman, (3) melatih mahasiswa untuk menjadi tenaga-tenaga ekonomi islam yang memiliki keunggulan akademik dan akhlak, dan (4) mengusahakan agar mempunyai peranan kepeloporan dibidang ekonomi islam yang dihadapi masyarakat global, khususnya di indonesia timur. Fakultas ini juga dipimpin oleh Dekan bersama Wakil Dekan yang menaungi empat jurusan dan satu prodi yang baru terbentuk. Jurusan/prodi di Fakultas tersebut yaitu Jurusan Ekonomi Islam; Jurusan Akuntansi; Jurusan Manajemen; Jurusan Ilmu ekonomi; serta prodi lainnya yakni Hukum Perbankan Syariah akreditasi. Fakultas tersebut difasilitasi dengan perpustakaan, Laboratorium Bank mini, serta laboratorium.

UIN Alauddin Makassar juga memiliki dua lembaga yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). LP2M UIN Alauddin Makassar lahir pada tanggal 28 Maret tahun 2013 berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi Tata Kerja (Ortaker) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Struktur organisasi LP2M terdiri atas Ketua, Sekretaris, Kepala Pusat, dan Kasubag Tata Usaha. LP2M memiliki lima kepala pusat yaitu Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak, Kepala Pusat Kajian Islam, Sains, dan Teknologi, dan Kepala Pusat Peradaban Islam. Tugas yang diemban oleh LP2M adalah

melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebijakan Rektor. Dari tugas tersebut, LP2M menyelenggarakan fungsi : (1) melaksanakan penyusunan rencana, evaluasi program, dan anggaran serta pelaporan, (2) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan, (3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, (4) pelaksanaan publik hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat, (5) pelaksanaan studi pemberdayaan gender dan anak, (6) pelaksanaan kajian Islam, sains, dan teknologi, pelaksanaan peradaban Islam, dan (8) pelaksanaan administrasi lembaga.

Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Alauddin Makassar merupakan bagian penting dari gerakan peningkatan dan penjaminan mutu perguruan tinggi secara keseluruhan dalam lingkup UIN Alauddin Makassar. LPM adalah unsur pelaksana dalam bidang pengembangan standar mutu, audit, dan pengendalian mutu akademik pada tingkat universitas. Lembaga Penjaminan Mutu secara organisatoris dinahkodai oleh seorang ketua, sekretaris, dua orang kepala pusat, dan seorang kepala sub bagian tata usaha. Pada lembaga ini terdapat dua kepala pusat yaitu Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu dan Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu. Pada awalnya, badan ini bernama Unit Peningkatan Mutu Akademik IAIN/UIN Alauddin Makassar.

UIN Alauddin Makassar juga memiliki beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT), Pertama, UPT perpustakaan yang merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengembangan kepastakaan, mengadakan kerjasama antar perpustakaan, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan kepastakaan. UPT Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. Selain itu, UPT Perpustakaan juga memiliki Pustakawan dan staf Tata Usaha.

Kedua, UPT Pengembangan Bahasa yang dipimpin oleh seorang Kepala, Tim Pengajar/Ahli bahasa, dan staf Tata Usaha. Kepala UPT Perpustakaan berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dengan tugas menyusun dan merumuskan konsep kebijakan dan perencanaan terkait

pengembangan bahasa. UPT ini mempunyai tugas memberikan pelayanan di bidang pengembangan materi ajar bahasa Inggris, metodologi pengajaran bahasa asing, dan pembinaan serta pengembangan bahasa asing bagi dosen dan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

Ketiga, UPT Pustipad (Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data) yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik. UPT ini dilengkapi dengan Tim Information Teknologi (IT) dan staf Tata Usaha. UPT Pustipad bertugas melaksanakan pengelolaan, pelyananan, pemeliharaan, pembinaan, dan pengembananan sistem teknologi informasi dan pangkalan data, mengadakan kerjasama dengan lembaga lain, mengendalikan, mengevaluasi dan menyusun laporan. Keempat, UPT Pengembangan Bisnis yang juga dipimpin oleh seorang Kepala, Tim Ahli, dan staf Tata Usaha. UPT ini bertugas melaksanakan pengelolaan, pemasaran, pengembangan, dan kerjasama bisnis untuk mendukung BLU UIN Alauddin Makassar.

9. Bidang Kerjasama

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas layanan tridarma perguruan tinggi yang meliputi bidang pendidikan dan pengajaran, bidang penelitian, dan bidang pengabdian kepada masyarakat, UIN Alauddin Makassar telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama yang dilaksanakan UIN Alauddin mulai dari tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kerjasama tersebut melibatkan berbagai elemen seperti Lembaga pendidikan dalam maupun luar negeri; Instansi Pemerintah, BUMN, Perusahaan Swasta serta lembaga-lembaga terkait lainnya.

BAB II

POTENSI, PERMASALAHAN, DAN ANALISIS STRATEGIS

Untuk mencapai tujuan berdasarkan visi dan misinya, UIN Alauddin Makassar menerapkan strategi pengembangan dengan berorientasi kepada analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat*). Hal ini berarti bahwa indikator keberhasilan yang sudah dan yang akan dicapai harus tetap berdasarkan pada analisis yang akurat untuk memudahkan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dan yang akan dilaksanakan.

A. *Strength* (Kekuatan)

1. UIN Alauddin Makassar merupakan Perguruan Tinggi Islam Negeri terbesar di KTI dan bertekad menjadi pusat transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis peradaban Islam, mengutamakan integrasi keilmuan dan keislaman sebagai diferensiasi dari perguruan tinggi lainnya;
2. Organisasi dan tata kerja, SDM, serta input mahasiswa baru sangat potensial mewujudkan visi, misi Universitas;
3. Peningkatan jumlah mahasiswa selama periode 2007-2015 mengindikasikan tingginya minat masyarakat untuk menempuh studi di UIN Alauddin Makassar;
4. Kualitas SDM berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagian besar memiliki pendidikan terakhir S-2 dan S-3, terutama pada SDM tenaga pendidik (dosen);
5. Input mahasiswa baru sangat berkualitas melalui seleksi nasional, yang memungkinkan implementasi keilmuan yang bersaing;
6. Banyaknya program studi non-Islamic studies membuka peluang UIN Alauddin Makassar Makassar membangun keunggulan

komparatif (*comparative advantages*) terhadap perguruan tinggi umum;

7. Tersedia media pengembangan diri dalam bentuk kegiatan ilmiah, olah raga, kewirausahaan, seni, sehingga lahir karya inovatif dan prestasi mahasiswa terus bertambah dari waktu ke waktu, baik pada tingkat regional maupun nasional;
8. Jaringan alumni yang tersebar pada berbagai lini di industri dari regional hingga pusat yang sangat membantu pengembangan universitas;
9. Dukungan Teknologi Informasi, akses internet, serta *global net working* yang sangat memadai, sehingga memungkinkan penelusuran bahan pustaka dan sistem pendukung pengambilan keputusan (*decision support system*);
10. Potensi kerjasama yang tinggi dengan berbagai lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik dalam maupun luar negeri
11. Memiliki *resources* yang menjadikan UIN Alauddin Makassar sebagai pusat kajian sumber (al-Qur'an dan Hadis);

B. Weakness (Kelemahan)

1. Transformasi manajemen IAIN ke UIN belum selesai;
2. Budaya kerja SDM yang belum sepenuhnya mengacu kepada pedoman yang memungkinkan tercapainya kualitas yang berkelanjutan (*continuing quality*);
3. Sarana dan prasarana yang belum memadai pada beberapa program studi yang baru, sementara peminat sangat banyak dan terus bertambah;
4. Sistem data belum sepenuhnya terintegrasi dari tiap unit kerja, sehingga sistem pengambilan keputusan belum sepenuhnya dapat memanfaatkan teknologi informasi;

5. Status akreditasi beberapa program studi yang masih rendah, terkait rasio dosen dan mahasiswa yang rendah dan ketersediaan dokumen yang terintegrasi;
6. Masih kurangnya jenis dan publikasi karya ilmiah (penelitian dan buku) serta karya yang mendapat HAKI/Paten;
7. Tingginya jumlah nota kesepahaman (MoU) dengan kalangan institusi internasional belum diikuti oleh implementasi dalam bentuk program kerjasama yang konkrit;
8. Meski terjadi peningkatan penerimaan baik dari Negara (APBN) maupun masyarakat (PNBP), kapasitas finansial UIN Alauddin Makassar untuk peningkatan mutu dan daya saing pendidikan masih terbatas, khususnya dalam konteks pengembangan institusi yang memiliki daya saing global;
9. Dualism pengelolaan PTKIN di bawah dua kementerian yaitu Kementerian Agama dan Kemenristek Dikti;
10. Kualitas tenaga administrasi yang masih perlu ditingkatkan;
11. Eksistensi dan otonomi kampus yang masih perlu dikuatkan.

C. Opportunity (Peluang)

1. Meningkatnya harapan/dukungan masyarakat (*social expectation*) terhadap sumber daya manusia dengan kualitas penguasaan IPTEKS sekaligus berperadaban Islam (berakhlak). Hal ini terlihat dari animo masyarakat dalam berbagai jenis jalur penerimaan calon mahasiswa baru yang meningkat setiap tahunnya;
2. Meningkatnya kesadaran akan bahaya radikalisme agama dan pentingnya saling pengertian antar umat beragama merupakan peluang bagi penguatan eksistensi UIN Alauddin Makassar sebagai institusi yang konsisten dan terdepan dalam pengembangan dan penyebarluasan pemahaman keagamaan Islam yang progresif dan toleran di Indonesia;

3. Dengan status sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UIN Alauddin Makassar memiliki peluang untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri dan berkelanjutan melalui usaha-usaha bisnis yang kreatif;
4. Reformasi birokrasi memberikan dampak otonomi yang lebih luas kepada institusi. Terbangunnya jejaring kerja sama dengan lembaga lain, baik dalam dan luar negeri;
5. Tersedianya beasiswa dari luar UIN Alauddin Makassar bagi mahasiswa yang miskin dan berprestasi;
6. Tersedianya peluang wirausaha yang besar serta *trend* pengembangan ekonomi kreatif seiring dengan perkembangan IPTEK yang didukung oleh pemerintah dan lembaga keuangan;
7. Terbukanya kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri yang dapat membantu menyerap alumni serta berkontribusi bagi peningkatan pendanaan pendidikan dan penelitian;
8. Terbukanya peluang kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan kajian sumber (al-Qur'an dan Hadis);
9. Tersedianya wadah untuk mengembangkan kajian integrasi keilmuan yang berbasis pada al-Qur'an dan Hadis;

D. Threat (Ancaman)

1. Persaingan global dalam dunia kerja menuntut perguruan tinggi dapat melahirkan alumni berkualitas dan mampu bersaing
2. Tuntutan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pengakuan kualitas universitas/program studi oleh pemerintah dan luar negeri (akreditasi dan manajemen mutu);
3. Perkembangan IPTEK yang sangat pesat dan tidak dapat segera diikuti oleh civitas akademika UIN Alauddin Makassar;

4. Kebijakan pendidikan di tingkat nasional, terkait otonomi universitas serta penganggaran yang sangat memengaruhi kualitas dan kuantitas pengembangan institusi, yakni menyangkut bidang keuangan, pengelolaan aset, dan kewenangan lain terkait penyelenggaraan bidang akademik;
5. Semakin meningkatnya kompetisi di kalangan perguruan tinggi. Selain ditandai dengan gencarnya promosi perguruan tinggi terkemuka mancanegara seiring berlakunya pasar bebas jasa, seperti MEA, kompetisi untuk menjadi *universitas yang bereputasi global* di kalangan perguruan tinggi dalam negeri juga cukup marak;
6. Keberadaan perguruan tinggi swasta di Indonesia pada umumnya, dan di wilayah Sulawesi Selatan dan khususnya di Kota Makassar, berpotensi menjadi alternatif pilihan bagi calon mahasiswa baru;
7. Keberadaan dan penerapan beberapa aturan Kementerian Agama yang belum seragam;

BAB III

KERANGKA PENGEMBANGAN

A. *Kerangka Pengembangan Universitas*

UIN Alauddin Makassar telah berkomitmen untuk mengembangkan institusi menjadi universitas yang bereputasi global. Sebuah universitas yang memiliki reputasi global apabila universitas tersebut memiliki daya saing dan pengakuan secara global, dengan beberapa indikator berikut: a). memiliki reputasi akademik yang unggul, b). alumni yang berdaya saing secara internasional, c). tingginya publikasi ilmiah dosen yang dirujuk, d). rasio yang ideal antara dosen dan mahasiswa, e). hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan secara internasional, f). tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan akademik, dan g). tingginya prosentase jumlah mahasiswa dan dosen asing.

Kerangka kebijakan UIN Alauddin Makassar dalam perumusan visi, misi, tujuan, dan program kegiatannya merujuk kepada berbagai dokumen Renstra sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Inti dari berbagai regulasi tersebut menggambarkan tujuan yang kuat untuk meningkatkan mutu dan daya saing institusi perguruan tinggi yang sejalan dengan tuntutan terhadap penguatan posisi strategis (*strategic positioning*) institusi perguruan tinggi. Dalam berbagai dokumen perencanaan tersebut, perguruan tinggi selalu diposisikan sebagai garda terdepan dalam proses peningkatan daya saing bangsa di tingkat global. Pada tataran inilah, relevansi pengembangan perguruan tinggi pada tingkat nasional menuju universitas yang bereputasi global menjadi penting.

Dalam merespon kebijakan tersebut, UIN Alauddin Makassar telah merumuskan visi, misi, dan tujuannya dalam beberapa tahapan

(*milestones*) yang nantinya diharapkan akan mengantarkan UIN Alauddin Makassar menjadi salah satu universitas yang bereputasi global pada tahun 2040. Perumusan visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada universitas yang bereputasi global tersebut merupakan respon positif terhadap isu pembangunan perguruan tinggi bertaraf internasional, dan dorongan cita-cita luhur untuk berperan aktif mewujudkan perguruan tinggi yang berkualitas, yang berkontribusi nyata mencetak sumber daya manusia yang bermutu, mengembangkan ilmu pengetahuan secara kontinu, serta mengimplementasikan secara nyata ilmu di masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai strategi dalam rangka merealisasikan visi tersebut, Renstra jangka panjang UIN Alauddin Makassar disusun dalam 4 (empat) tahapan (*milestones*) sebagai berikut: 2015-2040

1. Tahap Strengthening Internal Capacity (2015-2019)

Kebijakan tahap ini difokuskan pada pembenahan internal dan pembangunan karakter kelembagaan, baik pada aspek substansi akademik melalui pengembangan budaya penelitian dan penguatan kerangka integrasi keilmuan maupun aspek tata kelola kelembagaan dan keuangan. Keberhasilan tahap ini ditandai dengan terpenuhinya berbagai kondisi kelembagaan, baik dari sisi sistem akademik, tata kelola kelembagaan yang meliputi keuangan, organisasi dan sumber daya manusia maupun ketersediaan sarana dan prasarana (**matriks pada Lampiran**).

2. Tahap Improving Performance (2020-2024)

Fokus institusi pada tahap ini adalah upaya peningkatan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam kesatuan yang sinergis. Tahap ini merupakan tahap pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan jaminan mutu pendidikan, baik akademik

maupun non-akademik. Indikator keberhasilan pada tahap ini ditandai dengan peningkatan kerjasama UIN Alauddin Makassar dengan berbagai institusi, dalam dan luar negeri.

3. Tahap Comparative Advantages (2025-2029)

Peningkatan keunggulan kompetitif Prodi/Jurusan di lingkup UIN Alauddin Makassar yang berdaya saing dan tampil beda dibandingkan dengan Prodi/Jurusan di perguruan tinggi negeri yang lain melalui upaya pengintegrasian ilmu agama dan umum maupun sebaliknya menjadi orientasi utama institusi pada tahapan ini. Indikator keberhasilan tahap ini ditandai dengan peningkatan integrasi Prodi/Jurusan agama yang didukung/ditopang oleh ilmu umum maupun Prodi/Jurusan umum yang di-back-up dengan ilmu agama di setiap Prodi/Jurusan di lingkup UIN Alauddin Makassar.

4. Tahap Competitive Advantages (2030-2034)

Pada tahapan ini, UIN Alauddin Makassar memberikan penekanan yang maksimal pada bidang penelitian yang terintegrasi dengan kajian Islam. Kegiatan-kegiatan akademik yang diprogramkan, diarahkan untuk perbaikan dan penguatan kemampuan penelitian yang memiliki pengaruh yang kuat dan signifikan. Kajian lokal namun memiliki pengaruh global serta kesiapan Universitas untuk ikut terlibat dalam penelitian-penelitian yang memiliki hasil dan implementasi yang kuat untuk pengembangan Islam dan kemanusiaan secara integral menjadi fokus. Tingkat keberhasilan capaian pada tahapan ini dapat dilihat dari banyaknya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh civitas akademika UIN Alauddin Makassar yang memiliki keunggulan yang sangat kompetitif, baik pada tingkat regional, maupun di tingkat global.

5. Tahap Global Recognition (2035-2039)

Penguatan eksistensi dan daya saing UIN Alauddin Makassar pada taraf internasional menjadi fokus institusi pada tahapan ini. Indikator keberhasilan pencapaian pada tahap ini ditandai dengan terpenuhinya seluruh indikator *World Class University*.

B. Kebijakan Dan Program Strategis

1. Alur Perumusan Kebijakan, Program dan Kegiatan

Rencana Strategis UIN Alauddin Makassar tahun 2015-2019 ini merupakan penjabaran dari empat tujuan pengembangan yang telah disebutkan di atas. Keempat tujuan ini kemudian dikategorikan dalam empat kelompok kebijakan, yaitu:

- a. Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian pada Masyarakat;
- c. Kebijakan Peningkatan Kinerja, Efektivitas dan Efisiensi Struktur Organisasi;
- d. Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*).

Masing-masing kelompok kebijakan tersebut akan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis yang akan menjadi patokan dalam penyusunan program, kegiatan, indikator, dan target capaian. Gambar berikut menggambarkan alur perumusan kebijakan, program, dan kegiatan:

Alur Perumusan Program dan Kegiatan



2. Kebijakan, Program dan Kegiatan

a. Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran

Kebijakan peningkatan kinerja pendidikan dan pengajaran dikelompokkan dalam 8 (delapan) kebijakan strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Mutu Integrasi Islam dan Iptek

Program-program untuk peningkatan mutu integrasi Islam dan Iptek adalah: pengembangan keunggulan kompetitif dan komparatif.

2) Penguatan Program Studi

Guna meningkatkan aspek akademik Universitas, perlu dilakukan penguatan kapasitas program studi, workshop pengembangan dan penguatan spesifikasi program studi, pendampingan akreditasi program studi serta pendampingan dan penguatan database program studi.

3) Peningkatan Kualitas Pembelajaran

Program-program yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu: *pertama*, pengembangan modul pembelajaran STILeS (*Student Teacher*

Integrated Learning System); *kedua*, pemanfaatan IT dalam pembelajaran; *ketiga*, penggunaan bahasa asing dalam pembelajaran; *keempat*, evaluasi pembelajaran.

4) Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Dalam upaya peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dilakukan program-program yang mencakup: *pertama*, peningkatan mutu manajemen penyediaan dosen dan tenaga kependidikan; *kedua*, rekrutmen dan pengangkatan dosen berdasarkan kebutuhan program studi dan tenaga kependidikan berdasarkan analisis beban kerja; *ketiga*, peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik berdasarkan kebutuhan program studi dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntutan pekerjaan; *keempat*, pengusulan guru besar dan lektor kepala berdasarkan kualifikasi akademik, kompetensi, dan kebutuhan program studi.

5) Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan

Program-program yang dilakukan untuk peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan yaitu: *pertama*, peningkatan manajemen penyediaan sarana dan prasarana pendidikan; *kedua*, peningkatan mutu akademik sarana dan prasarana umum; *ketiga*, peningkatan kualitas sarana akademik khusus yang bermutu; *keempat*, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang yang bermutu.

6) Peningkatan Mutu Input Mahasiswa

Program yang dilakukan untuk peningkatan mutu input mahasiswa yaitu peningkatan kualitas seleksi penerimaan mahasiswa baru.

7) Peningkatan Mutu Mahasiswa

Guna meningkatkan mutu mahasiswa, maka dilakukan program-program yang mencakup peningkatan kualitas mahasiswa baru, peningkatan kualitas kegiatan kemahasiswaan, dan peningkatan kualitas akademik mahasiswa.

8) Peningkatan Mutu dan Daya Saing Alumni

Dalam upaya peningkatan mutu dan daya saing alumni, dilakukan program-program yaitu: *pertama*, peningkatan mutu manajemen alumni; *kedua*, peningkatan kompetensi profesional alumni; *ketiga*, peningkatan kompetensi *entrepreneurship*; *keempat*, peningkatan kompetensi personal/interpersonal.

b. Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat

Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dikelompokkan dalam 2 (dua) kebijakan strategis sebagai berikut:

1) Penyediaan Sarana Pengembangan Kompetensi Dosen

Kebijakan penyediaan sarana pengembangan kompetensi dosen dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) program yaitu: *pertama*, peningkatan kualitas dan kuantitas karya ilmiah civitas akademika; *kedua*, penyusunan dan penerbitan buku; *ketiga*, penyebarluasan gagasan.

2) Penguatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Integrasi Keilmuan

Guna menguatkan pengabdian masyarakat berbasis integrasi keilmuan perlu dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain desa binaan berbasis pos day, pelaksanaan kuliah kerja

nyata, penentuan arah kiblat masjid, desa mitra berbasis ABCD, penyusunan peta pengabdian, penyuluhan dan bakti sosial, penyusunan *gender equity policy*, workshop hisab rukyat, bantuan dan konsultasi hukum, pendampingan masyarakat berbasis prodi, pelatihan dan pemberdayaan masyarakat dengan pola-pola LSM sesuai prodi di UIN, dan mengadakan paket sekolah demokrasi untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam praktik politik di tingkat lokal.

c. Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Struktur Organisasi

Kebijakan peningkatan efektifitas dan efisiensi struktur organisasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) kebijakan strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Struktur Organisasi

Dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dilakukan 2 (dua) program yaitu: pertama, review tupoksi unit-unit organisasi; kedua, reorganisasi unit-unit organisasi berdasarkan tupoksi.

2) Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Antar Unit pada Area Kunci Manajerial

Kebijakan peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit pada area kunci manajerial dilaksanakan melalui 2 (dua) program yaitu: *pertama*, peningkatan koordinasi dan sinergi antar unit; *kedua*, pengembangan sistem informasi dan komunikasi antarlini.

3) Penguatan Koordinasi Pengelolaan Pascasarjana

Dalam upaya penguatan koordinasi pengelolaan pascasarjana, dilakukan melalui program penguatan pada Program Pascasarjana. Penguatan koordinasi itu melalui

jalur internal Pascasarjana berupa penguatan koordinasi struktur organisasi mulai dari direktur, wakil direktur dengan pengelola program studi berbasis Islam (sesuai pasal 24 Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2013 tentang organisasi dan tata kerja UIN Alauddin Makassar) dan jalur eksternal Pascasarjana berupa penguatan koordinasi dengan ketua jurusan di fakultas sebagai pengelola prodi di fakultas (sesuai Pasal 9 Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar).

d. Peningkatan Penegakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik

Kebijakan peningkatan peningkatan penegakan prinsip-prinsip tata kelola universitas yang baik dikelompokkan dalam 5 (lima) kebijakan strategis sebagai berikut:

1) Peningkatan Profesionalisme Manajemen Akademik

Program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen akademik yaitu: *pertama*, pengembangan sistem penjaminan mutu; *kedua*, peningkatan layanan penerimaan mahasiswa baru; *ketiga*, peningkatan layanan akademik mahasiswa.

2) Peningkatan Profesionalisme Manajemen SDM

Program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen SDM, yaitu: *pertama*, peningkatan efektivitas proses rekrutmen; *kedua*, pengembangan sistem karir PNS/ASN; *ketiga*, peningkatan kualitas SDM PNS/ASN; *keempat*, penilaian dan evaluasi PNS/ASN; *kelima*, peningkatan kesejahteraan PNS/ASN; *keenam*, pascakerja PNS/ASN.

3) Peningkatan Profesionalisme Manajemen Prasarana dan Sarana

Program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen prasarana dan sarana, yaitu: *pertama*, pemetaan dan pengembangan prasarana dan sarana berbasis kebutuhan; *kedua*, peningkatan pengamanan status hukum lahan dan bangunan; *ketiga*, akuntabilitas pengelolaan aset; keempat, penilaian, penghapusan, dan pemindahtanganan aset; kelima pengawasan dan evaluasi pengelolaan aset. Sebagai Contoh; mulai tahun 2017 ini Rektor UIN Alauddin mencanangkan program *One Touch Data* (OTD).

4) Peningkatan Profesionalisme Manajemen Perencanaan

Program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen perencanaan, yaitu: *pertama*, pengintegrasian antara program dan anggarannya; *kedua*, optimalisasi pengurangan revisi anggaran unit; *ketiga*, pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran.

5) Peningkatan Profesionalisme Manajemen Keuangan

Program-program yang dilakukan dalam rangka peningkatan profesionalisme manajemen keuangan, yaitu: *pertama*, tidak terjadinya pengulangan atas temuan yang sama baik oleh auditor eksternal maupun internal; *kedua*, peningkatan kualitas layanan keuangan; *ketiga*, penguatan kemandirian pendanaan melalui pemberdayaan pengembangan unit usaha bisnis (P2B); *keempat* pengembangan sistem informasi akuntansi dan pelaporan; *kelima*, pengawasan dan evaluasi.

Kebijakan program kegiatan, indikator dan target capaian tersebut di atas diuraikan secara rinci dalam **matriks (Lampiran)**.

BAB IV

STRATEGI PEMBIAYAAN

A. *Sistem Alokasi Dana*

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 telah mengatur tentang Perbendaharaan Negara Pasal 68 dan 69, mendorong dan menguatkan pengelolaan keuangan yang menitikberatkan pada kemandirian institusi, pengelolaan semi-swasta serta fleksibilitas di bidang keuangan sehingga institusi memiliki peluang untuk mengembangkan potensi pengelolaan anggaran utamanya dalam hal penerimaan dari kegiatan kerjasama dengan berbagai instansi. Peraturan inilah yang menjadi dasar UIN Alauddin Makassar merubah statusnya dari satuan kerja PNBPN biasa menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor. 330/KMK.05/2008, pada tanggal 20 November 2008.

Dengan status BLU, maka UIN Alauddin Makassar memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilaksanakan mulai dari tahap awal, yaitu: perencanaan, pengelolaan kas, piutang, investasi jangka pendek, dan pembiayaan dalam skema kewajiban jangka pendek serta pemanfaatan aset-aset yang bertujuan mengembangkan potensi dan optimalisasi kekayaan negara.

Seperti PTAIN lainnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Agama, UIN Alauddin Makassar memiliki dua sumber pendanaan, yaitu APBN yang dikenal dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan penerimaan dari masyarakat yang dikenal dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UIN Alauddin Makassar telah memperoleh izin untuk melakukan pengelolaan keuangan dengan pola Badan Layanan Umum (BLU) dari Kementerian Keuangan. Berdasarkan struktur anggaran UIN Alauddin Makassar Tahun 2014 dan 2015, kontribusi masing-masing dua sumber

pendanaan ini (DIPA APBN dan PNBPN) terhadap total anggaran masih memerlukan upaya keras manajemen universitas untuk mencapai komposisi yang ideal dan seimbang, meskipun saat ini menunjukkan trend yang mengarah pada komposisi yang semakin baik.

Jadi, komposisi ideal dan seimbang antara penerimaan negara (DIPA APBN) dan masyarakat (PNBP) untuk pembiayaan UIN Alauddin Makassar berdasarkan dua sumber penerimaan tersebut adalah:

1. Penerimaan dari negara melalui DIPA APBN sebesar 60%
2. Penerimaan dari masyarakat melalui PNBPN sebesar 40% dengan proporsi: Mahasiswa 25%; usaha-usaha ekonomi produktif 15%, yang termasuk di dalamnya pengembangan unit-unit bisnis yang berada di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Bisnis (P2B), kerjasama dengan berbagai instansi, baik instansi pemerintah daerah, swasta, dan lembaga donor lainnya baik dalam dan luar negeri, serta hasil dari dana wakaf tunai dan non-tunai).

Tabel Komposisi Sumber Pembiayaan
Tahap *Strengthening Internal Capacity* (2015-2019) SESUAIKAN!

NO	SUMBER	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	DIPA APBN	75%	69%	67%	65%	66.62%
2	PNBP Mahasiswa	23.5%	28%	29%	30%	30.84%
3	PNBP Sektor Produktif dan Dana Abadi	1.5%	3%	4%	5%	2.54%
	TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Sistem alokasi dana di UIN Alauddin Makassar telah mengacu pada asas akuntabilitas, transparansi dan efisiensi. Pengelola pendanaan UIN Alauddin Makassar juga menganut prinsip penganggaran partisipatif, yakni sistem penganggaran yang

melibatkan secara aktif semua jenjang manajemen, mulai dari Jurusan, Fakultas, Satuan-satuan Kerja, sampai Rektorat. Berdasarkan rencana strategis Kementerian Agama RI tahun 2015 - 2019, rencana strategis bisnis (Sentra Bisnis) UIN Alauddin Makassar tahun 2013-2018, rencana kerja tahunan, dan rencana bisnis anggaran (RBA) yang disusun setiap tahun. RBA ini menjadi rujukan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) dan penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran Kementerian dan Lemabaga. Pada akhir tahun setiap program dievaluasi melalui dokumen sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan dengan menggunakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK).

Sumber keuangan UIN Alauddin Makassar yang diperoleh dari PNBPN mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBPN. Sedangkan jenis PNBPN untuk Perguruan Tinggi didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 115/KMK.06/2001 Tanggal 7 Maret 2001 tentang tata cara penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Perguruan Tinggi Negeri. Jenis penerimaan PNBPN yang dimaksud dalam keputusan Menteri Keuangan tersebut terdiri atas:

1. Sumbangan pembinaan pendidikan
2. Biaya sekelsi ujian masuk Perguruan Tinggi
3. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Perguruan Tinggi
4. Hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi
5. Penerimaan dari masyarakat lain.

Pelaporan PNBPN dilakukan secara sentral, dikelola dan diadministrasikan Bendahara Penerima, sedangkan sistem penggunaannya secara terdesentralisasi dikelola setiap unit kerja sesuai

besaran alokasi dana yang diterima dan bentuk pertanggungjawaban sesuai peraturan yang berlaku. Sumber keuangan yang diperoleh UIN Alauddin Makassar setiap tahun dituangkan dalam dokumen resmi yang disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai dasar dalam melaksanakan anggaran. Perkembangan DIPA UIN Alauddin Makassar dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Perkembangan DIPA UIN Alauddin Makassar
Tahun 2012-2015 (dalam Rupiah)**

NO	JENIS	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
1	RM	180,912,690,000	176,977,704,000	186,941,447,000	242,496,443,000
2	PNBP /BLU	52,279,310,000	49,389,504,000	54,601,722,000	63,156,585,000
Jumlah		233,192,000,000	226,387,208,000	241,543,169,000	305,653,028,000

Selama periode tahun 2012–2015 penerimaan UIN Alauddin Makassar mengalami perkembangan yang ditunjukkan pada tabel di atas untuk mencapai peningkatan jumlah anggaran yang diterima, terus dikembangkan upaya melalui perencanaan, pelaksanaan, maupun pertanggung jawaban yang tidak lepas dari peraturan yang ada. Realisasi PNBP kegiatan operasional diperoleh dari pembayaran mahasiswa yang secara administratif yang masih aktif kuliah, jika dibandingkan PTN lain, UIN Alauddin Makassar menetapkan dana pendidikan relatif rendah dari mahasiswa Perguruan Tinggi lain. Dana pendidikan dari mahasiswa per semester berkisar antara Rp 400.000,- - Rp. 27.500.000,-. Realisasi penerimaan menunjukkan bahwa untuk pendapatan masyarakat non Tri Dharma Perguruan Tinggi belum maksimal. Oleh karena itu, UIN Alauddin Makassar berkomitmen dalam peningkatan pengelolaan pendanaan dari kemampuan UIN Alauddin Makassar adalah:

1. Penentuan biaya pendidikan pada era mendatang diharapkan justru mengurangi tingkat ketergantungan sumber dana yang berasal dari masyarakat, melalui peningkatan sumber pendapatan dan pengelolaan kekayaan UIN Alauddin Makassar,
2. Pemberdayaan P2B sebagai *income generating*,
3. Dalam rangka mendukung terwujudnya universitas bertaraf internasional, proporsi pendanaan yang digunakan pada program akademik,
4. Upaya penggalangan dana dari pihak eksternal untuk mendukung pelaksanaan kegiatan UIN Alauddin Makassar agar mencapai 50% total kebutuhan.

Dengan tata kelola BLU diproyeksi lima tahun kedepan terjadi peningkatan dalam hal pendapatan sumber pendapatan BLU UIN Alauddin Makassar diproyeksikan berasal dari 4 sumber yaitu PNBPA Akademik, PNBPA Non Akademik, Rupiah Murni, Kerjasama dengan Mitra/Institusi dari dalam dan luar Negeri. PNBPA dikelola UIN Alauddin Makassar dikelompokkan dalam 2 (dua) kelompok besar:

1. Penerimaan yang terkait pelaksanaan kegiatan operasional (akademik) (eks. PP 47 Tahun 2004).
2. Penerimaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan non operasional (diluar dari ketentuan PP 47 Tahun 2004), yaitu penerimaan dari UPT Perpustakaan, Pusat Bahasa, P2B dan lainnya.

Sejak tahun 2009 melalui kebijakan asas satu pintu (*one gate policy*) yang dikeluarkan oleh Rektor UIN Alauddin Makassar, maka seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan UIN Alauddin Makassar ditampung dalam satu rekening penerimaan di bawah pengelolaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan. Adapun penggunaannya melalui mekanisme APBN.

PNBP dikelola secara profesional yang ditujukan kepada peningkatan pelayanan mutu pendidikan tinggi sesuai dengan standar pelayanan minimum yang telah ditetapkan. Pengelolaan pendidikan dengan mengutamakan peningkatan pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efisien dan efektif dengan pertimbangan praktik bisnis yang sehat.

Diakui bahwa UIN Alauddin Makassar belum mampu memobilisasi dana secara optimal dari *profit centre* yang ada meskipun sebenarnya potensi yang ada cukup besar. Oleh karena itu, berbagai macam usaha telah dilakukan dalam meningkatkan sumber pendanaan dari berbagai usaha yang dilakukan dalam meningkatkan sumber pendanaan selain dari sumber-sumber dana yang ada. Namun sampai saat ini sumber pendanaan dari berbagai usaha yang dilakukan belum optimal dan masih memerlukan peningkatan pengelolaan.

**Tabel Realisasi Pendapatan PNBP Non Operasional
Tahun 2013-2015 (dalam Rupiah)**

SUMBER DANA	JENIS DANA	JUMLAH DANA (RUPIAH)			JUMLAH (RUPIAH)
		TS-2	TS-1	TS	
Pendapatan Usaha Bisnis	Alauddin Press	36.000.000	0	36.000.000	72.000.000
	Pusat Bahasa	10.000.000	12.500.000	15.000.000	37.500.000
	Pendapatan Kerjasama	26.000.000	26.000.000	26.000.000	78.000.000
	Pendapatan Sewa Asrama	337.525.000	518.625.000	468.500.000	1.324.650.000
	Training Center	2.139.089.867	2.255.761.000	2.461.120.000	6.855.970.867
	Pendapatan Usaha Lainnya	231.185.000	192.100.000	423.764.500	847.049.500

Penguatan Badan Layanan Umum pada kemampuan universitas mengoptimalkan pendapatan pada pusat bisnis yang dimiliki melalui

efisiensi, optimalisasi penggunaan sumber daya secara *holistic*. Realisasi PNBPN yang bersumber pendapatan dari masyarakat non Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tahun 2012 sampai 2015 digambarkan pada tabel di atas.

Unit bisnis merupakan usaha andalan UIN Alauddin Makassar yang diprediksi menjadi penopang pendapatan UIN Alauddin Makassar. Penerimaan dari unit bisnis (P2B) diprediksi mengalami peningkatan sebesar 28,21% per tahun. Peningkatan ini bersumber dari optimalisasi *asset* yang dimiliki UIN Alauddin Makassar yang berada di kampus I Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar, Kampus II Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa, dan Kampus III Pesantren Madani, Paccinongang, Gowa. Hal ini merupakan sumber pendapatan yang digunakan untuk membiayai kegiatan BLU UIN Alauddin Makassar.

Proyeksi penerimaan diprediksi meningkat setiap tahun sehingga dibutuhkan pengelolaan keuangan dan sistem akuntansi yang baik untuk merealisasikan target penerimaan sesuai dengan yang ditetapkan. Kondisi proporsi dana PNBPN relatif semakin meningkat dibandingkan dengan dana yang bersumber dari APBN, menuntut para pemimpin dan jajaran manajemen UIN Alauddin Makassar untuk berupaya menggali sumber dana, guna menjamin keandalan sumber pendanaan dan pencatatannya sesuai dengan perencanaan program dan penganggarannya.

UIN Alauddin Makassar telah memiliki tim Auditor Internal yang bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Tim Auditor Internal bidang keuangan dan *asset* memeriksa kesesuaian antara penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan dari setiap satuan kerja secara periodik. Tim ini melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pimpinan lembaga (Rektor) sebagai dasar evaluasi, pembenahan di masa mendatang dan dasar pengambilan keputusan. Laporan periodik hasil monitoring dan evaluasi disusun oleh tim Auditor Internal, Sub bagian yang menangani monitoring dan evaluasi di UIN Alauddin

Makassar secara periodik juga melaporkan perkembangan daya serap setiap unit kerja kepada pimpinan Universitas dan pimpinan di setiap unit kerja secara rutin. Sistem monitoring dan evaluasi selama ini masih berbasis pada sistem manual. Ke depan perlu dikembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis web yang dapat diintegrasikan dengan SIMPEG, SIAKA, SAIBA, dan lain-lain yang telah ada.

Jumlah anggaran yang senantiasa meningkat setiap tahunnya memerlukan pengelolaan yang senantiasa ditingkatkan melalui penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan. Dengan demikian, UIN Alauddin Makassar ke depan juga perlu mengembangkan sistem informasi perencanaan dan penganggaran. Selain itu UIN Alauddin Makassar juga perlu merencanakan *Merit system* dalam bidang keuangan. Upaya tersebut dilakukan untuk mencapai tata kelola yang akuntabel. Upaya-upaya yang telah dilakukan sampai saat ini guna menuju tatakelola tersebut, antara lain:

1. Mengajukan usulan perubahan tata kelola keuangan dari pengelolaan keuangan satker instansi pemerintah, menjadi pengelola keuangan BLU ini telah diterima dan disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, sehingga sejak tanggal 20 November 2008, UIN Alauddin Makassar menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU).
2. Menyusun sistem akuntansi dan system akuntansi biaya pengelolaan keuangan. Penyusunan ini bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menuju *Good University Governance*. Kegiatan penyusunan sistem akuntansi pengelolaan keuangan didanai dari anggaran Rupiah Murni (RM) dimulai sejak tahun 2011 sampai saat ini.
3. Menyesuaikan organisasi dan tata kerja (ortaker) dan Otatuta melalui pengajuan usulan revisi ortaker dan Statuta yang disusun dengan senantiasa memerhatikan aspek pengendalian internal

organisasi yang sehat dan baik. Sampai saat ini proses pembahasan usulan revisi statuta masih berlangsung. Revisi Statuta memiliki kontribusi yang signifikan dalam upaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan penguatan unit-unit untuk menggali sumber sumber keuangan non-akademik. Beberapa hal yang dilakukan dalam revisi antara lain:

- a. Menata struktur pengelolaan keuangan dengan memisahkan dengan tegas antara fungsi pembayar, fungsi operasi/belanja, dan fungsi pencatatan.
- b. Meningkatkan peran dan fungsi Audit Internal (Satuan Pemeriksa Internal = SPI).
- c. Meningkatkan peran dan fungsi unit pengelola dan pengembangan bisnis.
- d. Meningkatkan peran dan fungsi Audit Mutu Akademik Internal di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola keuangan difokuskan pada pencapaian visi, misi, dan tujuan UIN Alauddin Makassar. Hal ini dapat dilihat pada alokasi pembagian PNBPN yang sebagian besar ditujukan untuk aktifitas operasional perguruan tinggi, penggunaan dana tersebut seharusnya didukung oleh kegiatan yang melibatkan unit-unit bisnis dan laboratorium. Dana dana tersebut dikelola secara transparan dan akuntabel digunakan untuk penyelenggaraan proses pendidikan yang lebih berkualitas.

B. Distribusi Penggunaan Anggaran menurut Kelompok Kebijakan

UIN Alauddin Makassar menggunakan pendekatan sumber daya penerimaan dalam proses pengelolaan dan pengaturan anggaran, yaitu berasal dari dua sumber tersebut di atas. Agar penggunaan anggaran dapat

terlaksana yang memenuhi prinsip efisien, efektif, dan ekonomis maka metode yang digunakan dalam proses pendistribusian anggaran merujuk pada 4 (empat) kelompok kebijakan strategis Renstra seperti yang telah diuraikan di atas.

Pengalokasian dana untuk masing-masing kelompok kebijakan disesuaikan dengan jenis-jenis penerimaan. Proporsi dari kedua jenis penerimaan selanjutnya disesuaikan dengan visi strategis yang hendak dicapai pada akhir periode Renstra tahun 2019 ini, yaitu terpenuhinya prakondisi pada tahun 2018 untuk menjadi Universitas yang bereputasi global. Dengan metode ini, maka tiap kelompok kebijakan memperoleh proporsi anggaran yang berbeda-beda dari masing-masing sumber penerimaan tersebut.

1. Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja Pendidikan dan Pengajaran (KK1)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini terutama digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan-kegiatan rutin ini antara lain pembayaran gaji dan tunjangan (gaji PNS untuk tenaga pendidik dan kependidikan), pemenuhan untuk belanja barang dan jasa operasional kegiatan sehari-hari perkantoran dan perkuliahan. Selain untuk mendanai kegiatan rutin, alokasi anggaran untuk kelompok kebijakan ini juga dialokasikan untuk biaya pengembangan, seperti penyediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang memiliki kompetensi lebih, pengembangan kualitas alumni, serta peningkatan sarana dan prasarana pendidikan

2. Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian pada Masyarakat (KK2)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan untuk kegiatan peningkatan dan pengembangan kinerja dosen, yaitu alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas

kualitas dan publikasi pada bidang penelitian, pengabdian masyarakat, Sistem Informasi Manajemen (SIM) pada unit penelitian dan pengabdian masyarakat

3. Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja, Efektifitas, dan Efisiensi Struktur Organisasi (KK3)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan pada kegiatan pengembangan peran struktur organisasi, institusi yaitu dengan meningkatkan kinerja, efektifitas, dan efisiensi dari koordinasi dan sinergi antar unit pada level manajemen, terutama manajerial kunci serta upaya integrasi unit-unit bisnis dan pengembangan lembaga.

4. Kelompok Kebijakan Peningkatan Kinerja dan Penegakan Prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik (*Good University Governance*) (KK4)

Alokasi penggunaan anggaran untuk kelompok kebijakan ini difokuskan pada upaya institusi untuk meningkatkan kapabilitas manajemen: administrasi, akademik, penjaminan mutu, keuangan, pelaporan, SDM, sarana dan prasarana, serta kebijakan *Good University Governance* dan kebijakan *reward* dalam remunerasi BLU.

Kebutuhan anggaran dari keempat kelompok kebijakan yang dikemukakan di atas merupakan gambaran bahwa untuk tiga tahun ke depan (2015-2019) alokasi penggunaan anggaran adalah kombinasi antara kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan yang bersifat pengembangan. Estimasi umumnya adalah bahwa setiap tahun UIN Alauddin Makassar akan membutuhkan alokasi dana sebesar 60% untuk membiayai kegiatan rutin dan 40% untuk membiayai kegiatan pengembangan. Untuk keempat bidang di atas, pengeluaran yang besar masih didominasi oleh KK1 yakni 82%, KK2 sebesar 5%, KK3 sebesar 2% dan KK4 sebesar 11%.

C. Strategi Pencapaian Target Pembiayaan

Untuk mendukung pencapaian target pembiayaan periode 2015-2019, UIN Alauddin Makassar mengembangkan 3 (tiga) strategi sebagai berikut:

1. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran.

Strategi ini dilakukan dengan penyusunan standar internal Biaya Satuan Pendidikan Tinggi (BSPT) dengan melalui pendekatan *Activity Based Costing (ABC)*. Dalam penerapan di lembaga pendidikan tinggi yang merupakan sebuah organisasi yang masuk kepada kategori *non profit* atau nirlaba, menghitung pengeluaran keuangan berdasarkan kegiatan dan alokasi waktu untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Langkah awal dalam sistem ABC ini adalah dengan mengidentifikasi kegiatan yang disesuaikan dengan misi, tujuan, target dan lingkup dari perguruan tingginya, serta tipe manajemen yang diharapkan bisa mengelola kegiatan tersebut. Pengalokasian biaya untuk kegiatan dilakukan dengan identifikasi kegiatan tersebut. Dalam perguruan tinggi konvensional kegiatan perguruan tinggi didefinisikan sebagai Kegiatan Pengajaran, kegiatan Penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Umumnya di setiap bidang kegiatan tersebut digerakkan oleh administrasi, sehingga pembiayaan untuk kegiatan administrasi patut juga diperhitungkan tersendiri sebagai bagian dari kegiatan di sebuah lembaga. Setelah terdapat penetapan akan pendefinisian kegiatan, alokasi waktu untuk masing-masing unit (Fakultas, Jurusan atau Prodi) harus bisa disesuaikan dengan karakteristik dari setiap individu yang terlibat. Pendefinisian kegiatan dan alokasi waktu ini kemudian dianalisis pembiayaannya dan juga mengakumulasi sumber-sumber daya yang dapat menjadi *cost driver* (penggerak biaya) untuk kegiatan tersebut. Dalam konteks

perguruan tinggi *cost driver* adalah jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dengan membagi biaya berdasarkan biaya langsung dan tidak langsung:

a. Biaya langsung, terdiri dari:

1) Gaji dan honor dosen

Semua honor yang diberikan dalam rangka pengajaran harus diperhitungkan. Honor ini diberikan berdasarkan SK Rektor dan turunannya.

2) Bahan habis pakai pembelajaran (Kuliah dan Praktikum).

Bahan habis pakai ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu perkuliahan di kelas dan perkuliahan praktikum. Bahan habis pakai perkuliahan di kelas seperti spidol, kertas, printer dan lainnya. Sedangkan untuk bahan habis pakai praktikum dijabarkan berdasarkan dari data kurikulum untuk masing-masing mata kuliah memerlukan bahan habis pakai apa saja selama praktikum itu berlangsung.

3) Sarana pembelajaran langsung (Kuliah dan Praktikum)

4) Gedung yang digunakan dalam pembelajaran (Kuliah dan Praktikum). Komponen biaya tersebut kemudian dibagi berdasarkan *activity driver* dan dibagi dengan jumlah mahasiswa sehingga didapatlah *rate* untuk biaya langsung masing-masing komponen yang disebut dengan biaya pendidikan personal.

b. Biaya tidak langsung terdiri dari:

1) Biaya sumber daya manusia manajerial dan tenaga kependidikan;

2) Sarana dan prasarana non-pembelajaran;

3) Pemeliharaan;

- 4) Kegiatan pengembangan institusi (penelitian dosen, penelitian mahasiswa, kemahasiswaan, pengembangan program, pengabdian pada masyarakat dan lainnya).

Kedua jenis biaya ini digunakan untuk perhitungan anggaran yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL)/DIPA UIN Alauddin.Makassar. Dengan demikian, hasil perhitungan berfungsi sekaligus sebagai rasionalisasi atas anggaran yang diajukan untuk meningkatkan penerimaan dari sumber dana rupiah murni (APBN).

Sebagai Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), UIN Alauddin Makassar memiliki otonomi keuangan dalam pengelolaan pendanaannya. Hal tersebut menjadikan UIN Alauddin Makassar dapat memperoleh dana dari pihak non-pemerintah. Selain itu, secara pro-aktif dan berkelanjutan mengembangkan upaya penggalangan dana secara multisumber yang juga dibantu oleh Pusat Pengembangan Bisnis (P2B) UIN Alauddin Makassar. Untuk mendukung pencapaian target pembiayaan periode 2015-2019, UIN Alauddin Makassar mengembangkan 2 (dua) strategi sebagai berikut:

2. Peningkatan Upaya Perolehan Pendanaan “ Multi Sumber “:

- a. Jumlah dana dari kemitraan

Selama beberapa evaluasi ke belakang jalinan kerjasama perolehan dana dari kemitraan berlangsung sangat baik dan signifikan secara jumlah. Perluasan kemitraan akan membantu perolehan dana yang lebih efektif dan efisien. Perolehan dana dengan kemitraan dapat dilakukan dengan berbagai skema seperti:

- 1) *Link and match* dengan industri melalui *solving the real world problems (industry)*;
- 2) *Financed R&D expenditures, industry-sponsored research, and licensing revenue*;

- 3) Kontak dengan para alumni sukses (*regular donation, sponsoring research, students project, or courses*) dan *extremely wealthy individual*;
 - 4) *Private funding resources* seperti yayasan (*foundations*), asosiasi profesi;
 - 5) Perbankan seperti CSR dari perbankan mitra UIN Alauddin Makassar.
- b. Jumlah dana dari APBN
- Perolehan dana dari APBN cukup signifikan karena merupakan target perolehan dana dengan porsi terbesar kedua pada skema pendanaan UIN Alauddin Makassar setelah perolehan dana dari masyarakat.
- c. Jumlah Dana Lestari (saldo awal)
- Perolehan dana lestari perlu diupayakan untuk dapat mengalami peningkatan agar
- Dapat mempertahankan nilai modal dan mendapatkan hasil investasi yang optimal
- Dalam rangka mencapai kesinambungan dan pertumbuhan dana lestari (saldo awal). Oleh karena, itu diperlukan peningkatan penyelenggaraan usaha dengan bidang usaha yang berkaitan dengan kompetensi inti yang dimiliki UIN Alauddin Makassar.
- d. Jumlah Dana Hibah
- Perolehan dana hibah dapat bersumber baik dari dalam maupun luar negeri. Hibah seringkali diberikan bagi penelitian dalam bentuk: 1). *Joint research*, dengan perguruan tinggi di luar negeri; dan 2). *Grant research* dari pemerintah dengan mendorong dan memobilisasi para peneliti UIN Alauddin Makassar untuk memenangkan berbagai hibah yang tersedia seperti hibah bersaing, hibah Pascasarjana,

penelitian fundamental, serta hibah kompetisi. Disamping itu, hibah juga diberikan untuk program-program pendidikan seperti *professor exchange* dengan perguruan tinggi lain.

e. Jumlah Dana dari Masyarakat

Dana dari masyarakat diperoleh dari Uang Kuliah Tunggal (UKT). Perolehan dana dari masyarakat ini merupakan target porsi terbesar dalam rencana pendanaan UIN Alauddin Makassar.

f. Jumlah Dana dari Penerimaan Lainnya

Upaya perolehan dana harus multisumber sehingga membuka peluang yang luas.

Dalam perolehannya, beberapa upaya lain yang dapat dilakukan adalah:

- 1) Penataan lembaga bisnis UIN Alauddin Makassar di bawah koordinasi Pusat Pengembangan Bisnis (P2B), dengan cara mengoptimalkan kinerja Unit Bisnis pada UIN Alauddin Makassar yang ditujukan untuk mengurangi anggaran belanja universitas yang keluar dari universitas dan dapat dimanfaatkan sebagai kapital untuk diinvestasikan yang menghasilkan regenerasi kapital untuk reinvestasi dalam pembentukan kapital awal dari program entrepreneurship, perlu dukungan dana yang jelas, dan dapat dimulai dengan usaha sederhana, yakni: perusahaan air minum dan makanan untuk memenuhi kebutuhan komunitas universitas. Dengan demikian, pengeluaran dari komunitas universitas untuk kebutuhan tersebut dapat dipertahankan dalam lingkungan universitas dan dimanfaatkan untuk propagasi kapital untuk

direinvestasi dalam program *entrepreneurship*. Berangkat usaha kecil di atas, dapat diikuti dengan penataan berbagai usaha lain dari universitas seperti asrama mahasiswa, dan koperasi agar bersifat *entrepreneurship*. Sistem reinvestasi dan rekapitalisasi demikian akan dapat membantu pengembangan usaha komersial lain seperti toko buku, poliklinik, sertifikasi bahasa Inggris, biro perjalanan, produk hasil riset, rumah sakit, *training center*, percetakan penyewaan gedung, perparkiran, toko cinderamata (ATK, tas, kaos, jaket, gantungan kunci, fridge magnet, dan lain-lain), dan kantin makanan organik.

- 2) Membuka perusahaan/usaha-usaha produktif berdasarkan ekspertis sumber daya UIN Alauddin Makassar.
 - 3) Optimalisasi UIN Alauddin Makassar sebagai 'pusat' keilmuan di Indonesia.
 - 4) Pinjaman dengan mekanisme G to G dalam bidang pendidikan dan riset.
3. Monitoring evaluasi, dan fasilitasi implementasi program dan anggaran.
- Monitoring, evaluasi, dan fasilitasi implementasi program dan anggaran diukur melalui pencapaian indikator persentase serapan anggaran pelaksanaan program. Untuk dapat mengetahui evaluasi implementasi program dan anggaran dapat dilakukan dengan pendataan serapan anggaran pelaksanaan program disertai dengan rincian kualitas pelaksanaan program tersebut sehingga dapat diketahui serapan anggaran tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. *Pengembangan dan Pelaksanaan Renstra*

Renstra Universitas ini disusun dengan merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2015 - 2019 di bidang Pendidikan, dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tahun 2015 - 2019 di bidang Pendidikan Tinggi. Tujuan pembuatan renstra Universitas ini adalah sebagai pedoman kerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara Universitas. Hal ini dikarenakan renstra Universitas ini merupakan penjabaran dari rumusan visi, misi, dan tujuan Universitas. Renstra Universitas ini disusun sebagai panduan pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuan dan visi oleh manajemen Universitas. Dengan demikian, renstra Universitas ini harus menjadi komitmen bersama seluruh pihak dalam manajemen Universitas, agar pengembangan Universitas dapat berlangsung secara kontinu.

Karena renstra Universitas ini merupakan acuan kerja, maka perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan pada tingkat fakultas/lembaga/pusat/unit kerja untuk menjamin kontinuitas program kerja dan ketercapaian tujuan sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka masing-masing unit dan sub unit manajemen Universitas perlu melakukan identifikasi mengenai kebijakan, program dan kegiatan, serta memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, semua fakultas/lembaga/pusat/unit kerja di lingkup UIN Alauddin Makassar perlu memiliki Rencana Strategis masing-masing unit dalam rangka pengembangan potensi institusi secara optimal. Namun demikian, renstra masing-masing unit tersebut tetap mengacu pada renstra Universitas.

Diharapkan unit-unit kerja melakukan upaya koordinasi dan pendekatan yang bersifat sinergis, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi berbagai program dan kegiatan tersebut. Hal ini perlu dilaksanakan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih program, kegiatan dan anggaran antar unit. Jadi, eksistensi unit-unit tersebut dengan segala kekhususannya, mulai dari visi, tujuan, misi dan strategi pengembangan yang dipilih tidak bersifat independen, namun tetap terkait satu sama lain karena berdasarkan pada renstra yang sama, yaitu Renstra Universitas.

B. *Monitoring dan Evaluasi*

Implementasi renstra Universitas ini memerlukan kegiatan *monitoring and evaluation (monev)* dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari implementasi renstra itu sendiri. Kegiatan *monev* ini bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan kemudian mengevaluasinya untuk selanjutnya dilakukan tindakan-tindakan korektif. Kegiatan *monev* ini dilaksanakan oleh pimpinan universitas dan juga pimpinan fakultas/lembaga/pusat/unit kerja dengan berpedoman pada rencana kerja tahunan. Pada setiap tahun anggaran, pimpinan Universitas dan pimpinan fakultas/lembaga/pusat/unit kerja memastikan tersedianya rencana kerja tahunan yang merujuk pada Renstra Universitas dan Renstra fakultas/lembaga/pusat/unit. Tahapan selanjutnya adalah pimpinan universitas dan juga pimpinan fakultas/lembaga/pusat/unit kerja melakukan peninjauan secara berkala mengenai efektivitas seluruh program dan kegiatan pada fakultas/lembaga/pusat/unit kerja pada tahun berjalan.

Pimpinan universitas beserta pimpinan fakultas/lembaga/pusat/unit kerja – di akhir setiap tahun anggaran – melakukan evaluasi dalam bentuk kajian dan analisis terhadap

kontinuitas program dan kegiatan, serta pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut kemudian menjadi salah satu rujukan dalam menyusun program dan kegiatan serta penetapan target paa tahun berikutnya.

Pada akhir setiap tahapan (*milestone*), pimpinan universitas bersama pimpinan fakultas/lembaga/pusat/unit kerja melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan indikator serta target capaian yang telah dilaksanakan dan ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini meliputi ketepatan perencanaan, kontinuitas program dan kegiatan, ketercapaian indikator dan target, prestasi yang diraih, serta kendala-kendala yang dihadapi. Selanjutnya, hasil evaluasi pada setiap tahapan tersebut menjadi salah satu faktor pertimbangan penting dalam penyusunan rencana kerja dan penetapan strategi menuju tahap (*milestone*) berikutnya.

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019
				Tersusunnya Spesifikasi Program Studi yang Minimal Memenuhi Standar KKN	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			a.	Pendampingan Akreditasi Program Studi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			b.	Pendampingan dan Penguatan Database Program Studi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

			Kebijakan Peningkatan Kualitas Pembelajaran	1	Pengembangan Modul Pembelajaran STILeS	a.	Pengembangan Modul Pembelajaran STILeS	Tersedianya Modul STILeS Mata Kuliah	20%	40%	60%	40%	60%
						b.	Review Kurikulum secara Reguler	Terlaksananya Review Kurikulum Secara Teratur	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				2	Penguatan IT dalam Pembelajaran	a.	Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis e-Learning	Terlaksananya Proses Pembelajaran Menggunakan e-Learning	15%	40%	50%	40%	50%
				3	Penggunaan Bahasa Asing dalam Pembelajaran	a.	Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan pengantar Bahasa Asing	Terlaksananya Proses Pembelajaran dengan pengantar Bahasa Asing	2,5%	5%	10%	5%	10%

			4	Evaluasi Pembelajaran	a.	Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Mutu Pembelajaran Dosen	Terlaksananya Course Evaluation Survey	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
	Kebijakan Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik	1	Peningkatan Mutu Manajemen Penyediaan Dosen	a.	Pemetaan Kebutuhan Dosen Berdasarkan Program Studi	Tersedianya Database Peta Kebutuhan Dosen	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
			b.	Standarisasi Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tetap	Terlaksananya Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Sesuai dengan Standar	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			c.	Standarisasi Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tetap Non-PNS	Terlaksananya Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tetap Non- PNS Sesuai dengan Standar	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			d.	Standarisasi Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tidak	Terlaksananya Proses Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tidak Tetap/ Honorer	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					Tetap/Honorer	Sesuai dengan Standar						
				2	Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Berdasarkan Program Studi	a. Rekrutmen dan Pengangkatan Dosen Tetap PNS dan Non-PNS Berdasarkan Program Studi	Rata-Rata Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa Per-Program Studi	1:35	1:30	1:28	1:30	1:28
				3	Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Pendidik Berdasarkan Kebutuhan Program Studi	a. Pemberian Beasiswa untuk Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Dosen	Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S-2	20%	15%	13%	15%	13%
			Persentase Dosen Berkualifikasi Pendidikan S-3				30%	35%	40%	35%	40%	
			b. Sertifikasi Profesi Dosen			Persentase Dosen yang Telah	96%	98%	100%	98%	100%	



							Tersertifikasi						
						c.	Peningkatan Kompetensi Bahasa Asing Bagi Dosen	Persentase Dosen Bersertifikat TOEFL 500	15%	25%	35%	25%	35%
								Persentase Dosen Bersertifikat TOAFL 500	20%	30%	40%	30%	40%

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
			d.	Peningkatan Keterampilan Mengajar Dosen	Terlaksananya Pelatihan PEKERTI Bagi Dosen Muda	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					Terlaksananya Pelatihan Applied Approach Bagi Dosen Senior	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					Tersedianya Unit Teaching Development Tingkat Universitas yang Memberi Layanan Teaching Skills (Metodologi Pembelajaran dan IT) untuk Dosen	Persiapan	persiapan	Uji coba	Implementasi	Implementasi

					e.	Pelatihan Bahasa Asing Bagi Dosen	Terlaksananya Pelatihan Bahasa Inggris bagi Dosen	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
							Terlaksananya Pelatihan Bahasa Arab bagi Dosen	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					f.	Pelatihan Pembelajaran Berbasis IT dan e-Learning Bagi Dosen	Terlaksananya Pelatihan Pembelajaran Berbasis IT dan e-Learning Bagi Dosen	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			4	Pengusulan Guru Besar dan Lektor Kepala Berdasarkan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan	a.	Pengusulan Guru Besar Berdasarkan Kebutuhan Program Studi	Persentase Guru Besar terhadap Jumlah Dosen	5,5 %	10%	15%	10%	15%



					Kebutuhan Program Studi								
--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
				b.	Pengusulan Lektor Kepala Berdasarkan Kebutuhan Program Studi	Persentase Lektor Kepala terhadap Jumlah Dosen	20%	22,5%	25%	22,5%	25%
	Kebijakan Peningkatan Mutu Sarana dan Prasarana Pendidikan	1	Peningkatan Manajemen Penedyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	a.	Pemetaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Perguruan Tinggi	Tersedianya Data Base Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

						b.	Perumusan SOP, Penyediaan, Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Tersedianya Standar Operasional Prosedur Penyediaan, Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
								Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Inventarisasi dan Pemuktahiran Nilai Aset Prasarana dan Sarana Pendidikan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

				2	Peningkatan Mutu Akademik Sarana dan Prasarana Umum	a.	Peningkatan Ketersediaan Lahan dan Bangunan	Persentase Luas Lahan Hijau terhadap Luas Keseluruhan Lahan	40%	50%	60%	50%	60%	
									Persentase Luas Efektif terhadap Luas Keseluruhan Lahan	25%	30%	35%	30%	35%
									Persentase Luas Efektif terhadap Mahasiswa (m ²)	45	50	50	50	50
							b.	Peningkatan Kualitas Prasarana Perkuliahan	Rasio Luas Ruang Kuliah terhadap Mahasiswa (m ²)	0,5	1	1,5	1	1,5
									Persentase Ruang Kuliah dengan Perlengkapan Mebeler	70%	80%	90%	80%	90%

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019
				Persentase Ruang Kuliah dengan Media Pembelajaran	10%	20%	30%		
				Ketersediaan Pengeras Suara pada Ruang Kuliah Besar	80%	100%	100%	100%	100%
			c.	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Perpustakaan					
				Rasio Luas Ruang Perpustakaan terhadap Mahasiswa (m ²)	0,16	1	2	1	2
				Rasio jumlah judul Buku yang Up to Date	1:03	1:04	1:07	1:04	1:07
				Berlangganan Database Karya	1	2	3	2	3

						Ilmiah Online						
						d. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Pusat Pengembangan Bahasa	Tersedianya Gedung UPT Pusat Pengembangan Bahasa	0	50%	100%	50%	100%
						e. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rasio Komputer dengan Software yang Up to Date pada Area Publik terhadap Total Civitas Akademik	1;500	1;400	1;300	1;400	1;300
					Jumlah Access Point dalam Area Kampus		100	200	300	200	300	
					Rasio Access Point terhadap Total Civitas Akademika		1;500	1;400	1;300	1;400	1;300	

				f.	Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis IT	Tersedianya Sistem Pembelajaran Berbasis IT(E-Learning)	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi
				g.	Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dosen	Tersedianya Ruang Kerja Dosen Per-Dosen	2m	3m	4m	3m	4m
						Persentase Ruang Memenuhi Standar Rasio Luas Ruang Dosen terhadap Jumlah Dosen Per-Program Studi	10%	20%	30%	20%	30%
						Kelengkapan Fasilitas Ruang Dosen	10%	20%	30%	20%	30%
KELOMPOK	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN			INDIKATOR		TARGET CAPAIAN				

[Type here]

KEBIJAKAN				PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
				3	Peningkatan Kualitas Sarana Akademik Khusus yang Bermutu	a. Peningkatan Kualitas Laboratorium	Tersedianya Laboratorium yang Up to Date dan Memenuhi Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	50%	60%	70%	60%	70%
						b. Pengembangan <i>Teaching Hospital</i>	Tersedianya <i>Teaching Hospital</i> yang Memenuhi Standar	Perencanaan	Pengkajian	Persiapan	Pengkajian	Persiapan
						c. Peningkatan Kualitas Laboratorium pada Program Studi Rumpun Ilmu Keagamaan	Rasio Luas Ruang Laboratorium terhadap Pengguna	1m	1.5m	2m	1.5m	2m
							Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang Up to Date dan Memenuhi Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	40%	50%	70%	50%	70%

						d.	Peningkatan Kualitas Laboratorium pada Program Studi Rumpun Ilmu Sosial dan Rumpun Humaniora	Rasio Luas Ruang Laboratorium terhadap Pengguna	1m	1.5m	2m	1.5m	2m
								Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang Up to Date dan Memenuhi Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	40%	50%	70%	50%	70%
						e.	Peningkatan Kualitas Laboratorium/ Bengkel pada Program Studi Rumpun Ilmu Sains dan Teknologi	Rasio Luas Ruang Laboratorium terhadap Mahasiswa	2m	3m	4m	3m	4m
								Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang Up to Date dan Memenuhi Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	50%	60%	70%	60%	70%

						f.	Peningkatan Kualitas Laboratorium/ Bengkel pada Program Studi Rumpun Ilmu Kedokteran dan Kesehatan Masyarakat	Rasio Luas Ruang Laboratorium terhadap Mahasiswa	2m	3m	4m	3m	4m
								Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang Up to Date dan Memenuhi Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja	50%	60%	70%	60%	70%

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
		4	Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang yang Bermutu	a.	Pengembangan Asrama/Mahad Mahasiswa	Persentase Ketersediaan Fasilitas Asrama/Mahad Mahasiswa	5%	10%	15%	10%	15%
				b.	Pengembangan <i>Book Store</i> dan <i>Souvenir Center</i>	Tersedianya <i>Books Store</i> dan <i>Souvenir Center</i>	Pengkajian	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi
				c.	Pengembangan Fasilitas Olahraga dan Seni dengan Standar Nasional/ Internasional	Tersedianya Fasilitas Olahraga dan Seni dengan Standar Nasional/ Internasional	Pengkajian	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi

					d.	Pengembangan Fasilitas Transportasi Internal Kampus dalam bentuk <i>Loop Bus</i>	Tersedianya Fasilitas Transportasi Internal Kampus dalam Bentuk <i>Loop Bus</i>	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					e.	Pengembangan Pusat Kegiatan Mahasiswa	Pengembangan Kapasitas Pusat Kegiatan Mahasiswa	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					f.	Pengembangan Tempat Parkir Kendaraan	Persentasi Jumlah Kendaraan dengan Tempat Parkir yang Memadai	50%	60%	70%	60%	70%
F	Kebijakan Peningkatan Mutu Input Mahasiswa	1	Peningkatan Kualitas Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru	a.	Pengembangan Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru	Meningkatnya Rata-rata Pengunjung Situs Penerimaan Mahasiswa Baru per-Hari	100	150	200	150	200	

						b.	Sosialisasi Penerimaan Mahasiswa Baru	Rata-Rata Rasio Calon Mahasiswa Lulus SPMB terhadap Pendaftar	1:08	1:09	1:10	1:09	1:10
						c.	Perumusan Nilai Ambang Batas Minimum Kelulusan Mahasiswa Berdasarkan Program Studi	Rata-rata Nilai Ambang Batas Minimum Kelulusan SPMB	N.A	5,50	6,00	5,50	6,00
						d.	Perumusan Kuota Penerimaan Mahasiswa Per-Program Studi	Penerimaan Mahasiswa Baru Berdasarkan Rasio Dosen dan Mahasiswa	1:31	1:30	1:28	1:30	1:28

NO	KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
			PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
		Kebijakan Peningkatan Mutu Mahasiswa	1	Peningkatan Kualitas Mahasiswa Baru	a.	Pelaksanaan Orientasi Sukses di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru	Terlaksananya Orientasi Sukses di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Baru	Persiapan	Persiapan	Uji coba	Implementasi	Implementasi
					b.	Pelaksanaan Character Building Program untuk Mahasiswa Baru	Terselenggaranya Character Building Training bagi Mahasiswa Baru	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
							Terselenggaranya Kelas Bahasa Inggris bagi Mahasiswa baru	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

						Terselenggaranya Kelas Bahasa Arab bagi Mahasiswa baru	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	
					c.	Pelaksanaan Wokshop Islam Untuk Disiplin Ilmu (IDI) bagi Mahasiswa Baru dengan Latar Belakang Sekolah Umum	Terselenggaranya Workshop Islam Untuk Disiplin Ilmu (IDI) bagi Mahasiswa Baru dengan Latar Belakang Sekolah Umum	Pengkajian	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi
					d.	Pelaksanaan Wokshop Islam Untuk Disiplin Ilmu (IDI) bagi Mahasiswa Baru dengan Latar Belakang Sekolah Agama	Terselenggaranya Workshop Islam Untuk Disiplin Ilmu (IDI) bagi Mahasiswa Baru dengan Latar Belakang Sekolah Agama	Pengkajian	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi

			2	Peningkatan Kualitas Kegiatan kemahasiswaan	a.	Standarisasi Mutu Kegiatan Mahasiswa	Tersedianya Standar Mutu Kegiatan Mahasiswa	Persiapan	Uji Coba	Implementasi	Uji Coba	Implementasi
					b.	Peningkatan Partisipasi Mahasiswa dalam Berbagai Kegiatan	Persentase Partisipasi dan Prestasi Mahasiswa dalam Kegiatan	5%	7%	9%	7%	9%



KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
		3	Peningkatan Kualitas Akademik Mahasiswa	a. Monitoring Perkembangan Akademik Mahasiswa	Tersedianya Data Perkembangan Akademik Setiap Mahasiswa	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					Tersedianya Monitoring dan Kontrol Kegiatan Akademik dari Dosen Penasihat Akademik	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				b. Ketersediaan Fasilitas dan Lingkungan Belajar yang Berkualitas bagi Perkembangan Akademik	Tersedianya Career Development Unit (CDU) bagi Mahasiswa	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					Tersedianya Fasilitas Olahraga dan Seni yang Berkualitas bagi Mahasiswa	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi



			Saing Alumni			b.	Peningkatan Kualitas Manajemen Ikatan Alumni UIN-AM	Berkembangnya IKA UIN Alauddin sebagai Wadah Komunikasi Alumni UIN-AM	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
--	--	--	--------------	--	--	----	---	---	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
				Tersedianya Database Alumni UIN-AM yang Lebih Akurat	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi		
			c.	Survei Kepuasan Pengguna terhadap Alumni	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi		
				Tersedianya Database Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Alumni	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi		
		2	Peningkatan Kompetensi Profesional Alumni	a.	Peningkatan Kerjasama dengan Dunia Profesi dan Industri	Persentase Sertifikasi Profesi Lulusan	10%	20%	30%	20%	30%

					b.	Peningkatan Kerjasama Beasiswa Melanjutkan Pendidikan	Persentase Mahasiswa Melanjutkan Pendidikan	3%	5%	10%	5%	10%
			3	Peningkatan Kompetensi Kewirausahaan	a.	Integrasi Pendidikan Kewirausahaan dalam Kurikulum	Tersedianya Mata kuliah Berbasis Kewirausahaan dalam Kurikulum Program Studi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					b.	Bimbingan dan Konsultasi dan Kewirausahaan Melalui Career Development Unit (CDU)	Tersedianya Layanan Bimbingan dan Konsultasi dan Kewirausahaan Melalui Career Development Unit (CDU)	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			4	Peningkatan Kompetensi Personal/ Interpersonal	a.	Bimbingan dan Konsultasi Karakter Profesional Melalui CDU	Terlaksananya Bimbingan dan Konsultasi Melalui CDU	N.A	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi



						b.	Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Alumni Secara Reguler	Terselenggaranya Silaturahmi Alumni Secara Reguler	N.A	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi
--	--	--	--	--	--	----	---	--	-----	-----------	--------------	-----------	--------------

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
Peningkatan Kinerja Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat	Penyediaan Sarana Pengembangan Kompetensi Dosen	1	Peningkatan Kualitas dan kuantitas Karya Ilmiah Civitas Akademika	a. <i>Short Course</i> Penulisan dan Penelitian dalam dan atau luar negeri	Terlaksananya <i>Short Course</i> Penulisan dan Penelitian dalam dan atau luar negeri	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				b. <i>Inhouse Research Training</i>	Terlaksananya <i>Inhouse Research Training</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				c. <i>Workshop Metode Penelitian</i>	Terlaksananya <i>Workshop Penelitian</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					d	<i>Workshop</i> Penulisan Karya Ilmiah	Terlaksananya <i>Workshop</i> Penulisan Karya Ilmiah	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					e	Penyusunan Peta Penelitian	Tersedianya Peta Penelitian	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					f.	<i>Participatory Action Research</i>	Terlaksananya <i>Participatory Action Research</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					g	<i>Community Based Research</i>	Terlaksananya <i>Community Based Research</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					h	Peningkatan Partisipasi	Prosentase Dosen yang Berpartisipasi dalam	30	50	70%	50%	70%

[Type here]

					.	Penelitian	Penelitian	%	%			
					i.	Jurnal Terakreditasi	Tersedianya Jurnal Terakreditasi	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					j.	Pengusulan HAKI dan Hak Paten	Tersedianya HAKI dan Hak Paten	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi
					k.	Penyusunan Renstra Penelitian	Tersedianya Renstra Penelitian	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					o . Peningkatan kuantitas, kualitas dan aktualitas koleksi pustaka ilmiah perpustakaan pusat yang menunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	Tersedianya koleksi bahan pustaka ilmiah perpustakaan pusat yang lengkap, berkualitas dan <i>update</i> yang menunjang kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
--	--	--	--	--	--	--	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
		2	Penyusunan dan Penerbitan Buku	a . Gerakan Seribu Buku	Terlaksananya Gerakan Seribu Buku	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				b . Buku Daras	Tersedianya Buku Daras	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				c. Peningkatan manajemen UIN Alauddin Press untuk menjadi penerbit profesional	UIN Alauddin Press untuk menjadi penerbit profesional dan punya reputasi nasional	30 %	30%	30 %	30%	30%

[Type here]

				3	Penyebarluasan Gagasan	a	Orasi Ilmiah	Prosentase Dosen Membawakan Orasi Ilmiah	20 %	40%	60 %	40%	60%
						b	Narasumber	Prosentase Dosen Menjadi Narasumber	20 %	40%	60 %	40%	60%
						c.	Tulisan di Media	Termuatnya Tulisan Dosen di Media	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
						d	Tulisan di Jurnal Terakreditasi	Termuatnya Tulisan Dosen di Jurnal Terakreditasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
						e	Tulisan di Jurnal Terindeks	Termuatnya Tulisan Dosen di Jurnal Terindeks	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi

[Type here]

					f.	Presentasi makalah hasil penelitian di konferensi/ seminar nasional dan internasional	Mendapatkan surat undangan dan piagam sebagai nara sumber seminar/konferensi internasional	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					g.	Mentradisikan kuliah umum, seminar dan diskusi ilmiah rutin di tingkat fakultas dan universitas	Terselenggaranya secara reguler kuliah umum, seminar dan diskusi ilmiah di tingkat fakultas dan universitas	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
	Penguatan Pengabdian Masyarakat Berbasis Integrasi keilmuan	1	Pengabdian Masyarakat Berbasis Integrasi keilmuan	a . Desa Binaan Berbasis Pos Daya	Tersedianya Desa Binaan Berbasis Pos Daya	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
b . Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata				Terlaksananya Kuliah Kerja Nyata	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	
c. Penentuan Arah Kiblat Masjid				Terlaksananya Penentuan Arah Kiblat Masjid	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	

					d .	Desa Mitra Berbasis ABCD	Tersedianya Desa Mitra Berbasis ABCD	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					e .	Penyusunan Peta Pengabdian	Tersedianya Peta Pengabdian	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					f.	Penyuluhan dan Bakti Sosial	Terlaksananya Penyuluhan dan Bakti Sosial	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					g	Penyusunan . <i>Gender Equity Policy</i>	Tersedianya <i>Gender Equity Policy</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					h	Penyusunan . <i>Environmental Management Policy</i>	Tersedianya <i>Environmental Management Policy</i> sebagai <i>Cross Cutting Issue</i>	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					h	Pengarusutamaa . n Gender bagi Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Pengarusutamaan Gender bagi Masyarakat	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					i.	Pembelajaran Berbasis Pengabdian- Service Learning	Tersedianya Pembelajaran Berbasis Pengabdian	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					j.	Workshop Hisab Rukyat	Telaksananya Workshop Hisab Rukyat	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					k.	Bantuan dan Konsultasi Hukum	Tersedianya Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					l.	Layanan literasi perpustakaan	Tersedianya layanan literasi perpustakaan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					m.	Layanan bantuan kesehatan bagi masyarakat	Tersedianya layanan bantuan kesehatan bagi masyarakat	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					n . Ruang aspirasi publik	Tersedianya ruang aspirasi public	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					o . Digitalisasi dokumen kemitraan universitas masyarakat	Tersedianya dokumen elektronik/online kemitraan universitas masyarakat	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					p . Penerbitan Jurnal Kemitraan Universitas masyarakat	Tersedianya Jurnal KUM	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					q . Pelatihan pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD	Terlaksananya pelatihan pemberdayaan masyarakat berbasis ABCD	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					r.	Pendampingan Masy Berbasis ABCD sesuai prodi di UIN	Terlaksananya Pendampingan masy berbasis ABCD	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					s.	Mengadakan paket sekolah demokrasi untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam praktik politik di tingkat lokal	Terselenggaranya paket sekolah demokrasi untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi warga dalam praktik politik di tingkat lokal	30%	30%	30%	30%	30%

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN								
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019				
3	Kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi	1	Kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi	1	Review tupoksi unit-unit organisasi	a.	Menganalisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di unit-unit organisasi pada semua lini	Tersedia dokumen hasil analisis potensi, kekuatan, dan kelemahan yang ada di unit-unit organisasi dari setiap lini	Persiapan	implementasi	implementasi	implementasi	implementasi
						b.	Menganalisis peluang, tantangan, dan ancaman yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar	Tersedia dokumen hasil analisis peluang, tantangan, dan ancaman yang ada di masyarakat dan lingkungan sekitar	implementasi	implementasi	implementasi	implementasi	implementasi

						c.	Mengidentifikasi kemitakhiran pedoman organisasi dan tatakerja unit-unit organisasi sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan pedoman yang baru	Tersedia dokumen hasil identifikasi kemitakhiran pedoman organisasi dan pedoman tatakerja unit-unit organisasi yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengembangan pedoman yang baru yang terkoordinasi pada setiap unit	imp.	imp.	imp.	imp.	imp.
						d.	Mengevaluasi dan menilai efektivitas kinerja atau mutu outcome unit-unit organisasi	Tersedia dokumen hasil evaluasi dan penilaian efektivitas kinerja atau mutu outcome unit-unit organisasi	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

				e.	Menetapkan standar dan target yang harus dicapai oleh unit-unit organisasi dalam satu periode tertentu	Tersedia dokumen ketetapan standar dan target yang harus dicapai oleh unit-unit organisasi dalam satu periode tertentu	persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			2	a.	Reorganisasi unit-unit organisasi berdasarkan tupoksi	Menyusun naskah akademik tentang pentingnya menata ulang organisasi pada setiap unit	Tersedia naskah akademik	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
			b.	Menata ulang organisasi pada setiap unit dalam konteks perampingan atau efisiensi personil sesuai tupoksi (prinsip keseimbangan)	Terbentuk struktur organisasi baru yang efisien dan efektif pada setiap unit sesuai tupoksi	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			c.	Menata ulang organisasi pada setiap unit dalam konteks pemangkasan jalur birokrasi	Terbentuk struktur organisasi baru yang mendukung percepatan pelaksanaan kegiatan pada setiap unit organisasi	persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

		2	Peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit pada area kunci manajerial	1	Peningkatan koordinasi dan sinergi antarunit	a.	Rapim dan Rakor secara berkala	Tersedianya jadwal dan dokumen hasil rapat	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				2	Pengembangan sistem informasi dan komunikasi antarlini	a.	Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi secara online	Tersedia aplikasi sistem informasi secara online	Persiapan	Pembuatan	Implementasi	Pembuatan	Implementasi
		3	Penguatan koordinasi pengelolaan program pascasarjana	1	Penguatan program pascasarjana	a.	Penguatan kapasitas program Pascasarjana	Peningkatan nilai akreditasi prodi lingkup PPS	50% A	60% A	70% A	60% A	70% A

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN								
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019				
4	Peningkatan Penegakan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Universitas yang Baik	1	Kebijakan Peningkatan Profesionalisme Manajemen akademik	1	Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu	a.	Pengembangan Standar Penjaminan Mutu	Tersedianya Standar Penjaminan Mutu	Implementasi	Perbaikan	Implementasi	Implementasi	Implementasi
						b.	Pengembangan Sistem Informasi Penjaminan Mutu	Tersedianya Database Penjaminan Mutu yang Up to Date	Implementasi	Implementasi	Evaluasi & Improvement	Evaluasi & Improvement	Evaluasi & Improvement
						c.	Penyelenggaraan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Terhadap Mutu Pengajaran dan Akademik	Meningkatnya Jaminan Mutu Akademik	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

					d .	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kinerja Lembaga Penjaminan Mutu	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					e .	Peningkatan Akreditasi Nasional Program Studi	Meingkatnya Peringkat Akreditasi Nasional Program Studi	10 % A	15 % A	25 % A	25 % A	25 % A
					f.	Peningkatan Akreditasi Internasional Program Studi	Meningkatnya Peringkat Akreditasi Internasional Program Studi	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Persiapan	Persiapan
					g .	Peningkatan Akreditasi Nasional Institusi	Meningkatnya Peringkat Akreditasi Nasional Institusi	Persiapan	Akreditasi	Evaluasi Hasil Akreditasi	Evaluasi Hasil Akreditasi	Evaluasi Hasil Akreditasi

				2	Peningkatan Layanan Penerimaan Mahasiswa Baru	a	Sistem Penerimaan Calon Mahasiswa Baru Online	Terselenggaranya Penerimaan Mahasiswa Baru secara Secara Online	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
						b	Regitrasi Mahasiswa Baru Online	Terselenggaranya Regitrasi Mahasiswa Baru Online	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				
		PROGRAM	KEGIATAN				2015	2016	2017	2018	2019
		3	Peningkatan Layanan Akademik Mahasiswa	a	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik (SIKA)	Meningkatnya Pemanfaatan Sistem Informasi Akademik (SIKA)	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
	Peningkatan Profesionalisme Manajemen SDM	1	Peningkatan Efektivitas proses rekrutmen	a	Penyusunan Analisis Jabatan Pengembangan dan perencanaan SDM Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi	Tersedianya Analisis jabatan dan Pengembangan SDM	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi
				b	Penyusunan SOP Rekrutmen PNS Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi	Terlaksananya Rekrutmen Berbasis Kebutuhan dan Kompetensi	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi

				c	Pengembangan sistem <i>database</i> PNS/ASN dalam SIMPEG terintegrasi	Tersedianya <i>historical database</i> setiap PNS/ASN dalam data yang aman dan lengkap	50%	70%		70%		
			2	Pengembangan Sistem Karir PNS/ASN	a	Assessment dan Pemetaan kompetensi PNS/ASN	Tersusunnya Peta Kompetensi PNS/ASN	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi
					b	Penyusunan Rumpun Karir PNS/ASN	Tersusunnya Peta Rumpun PNS/ASN	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi
					c	Penempatan PNS/ASN sesuai dengan keahlian	Tersusunnya jabatan dengan kesesuaian penempatan kompetensi PNS/ASN	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi



							Promosi, Rotasi Berbasis Kinerja dan Keahlian	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi
--	--	--	--	--	--	--	---	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
		3	Peningkatan kualitas SDM PNS/ASN	a	Melakukan Pendidikan dan Pelatihan PNS/ASN	Meningkatnya Pengetahuan, keterampilan, kualitas kerja dan layanan	70%	80%	100%	80%	100%
				b	Training <i>soft skill</i> PNS/ASN	Meningkatnya sikap, motivasi dan semangat kerja	50%	70%	90%	70%	90%
		4	Penilaian dan evaluasi PNS/ASN	a	Penyusunan indikator dan target kinerja	Tersusunnya kerangka acuan kerja PNS/ASN	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	implementasi	Implementasi
				b	Pengembangan aplikasi penilaian PNS/ASN berbasis ICT	Tersedianya penilaian PNS/ASN yang mudah, akurat dan objektif	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Pengembangan	Implementasi

				c	Penandatanganan kontrak kinerja	Tersedianya dokumentasi dan ukuran target kerja	50%	70%	100%	70%	100%
				d	Audit kinerja PNS/ASN	Tersusunnya pedoman petunjuk teknis pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	Implementasi	Implementasi
			5	a	Pengembangan Sistem Remunerasi	Tersedianya sistem dan perangkat implementasi remunerasi BLU	Persiapan	Pengembangan	Implementasi	P Implementasi	Implementasi
						Pengembangan sistem remunerasi BLU diselaraskan dengan remunerasi reformasi birokrasi (R/B)	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi

						b	Apresiasi PNS/ASN berprestasi	Tersedianya perangkat remuneration for people	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi
								Tersedianya perangkat remuneration for performance	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Persiapan	Implementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN				INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN				2015	2016	2017	2018	2019	
		6	Pascakerja PNS/ASN	a	Program kegiatan Persiapan bagi PNS/ASN (Masa Pra Pensiun)	Terbentuknya motivasi dan spirit masa pensiun	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	
				b	Pembentukan forum PNS/ASN pascakerja (pensiunan)	Terbentuknya wadah komunikasi dan organisasi setelah Pensiun	Persiapan	Persiapan	Implementasi	Implementasi	Implementasi	
	3	Kebijakan Peningkatan profesionalisme Manajemen Keuangan	1	Tidak terjadinya pengulangan atas temuan yang sama baik oleh auditor External maupun internal	a	Audit kepatuhan oleh SPI	Meningkatnya ketaatan dan pemahaman terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
				b	Meningkatkan proses verifikasi pencairan anggaran	Berkurangnya waktu yang dibutuhkan dalam proses verifikasi sampai pada pencairan anggaran	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	

			2	Peningkatan kualitas Layanan keuangan.	a	Pengembangan sistem dan prosedur Pelaksanaan Anggaran	Pelayanan keuangan yang terencana dan sesuai SOP yang ada	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					b	Ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan	Pelaksanaan program dan kegiatan sesuai jadwal	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
							Ketaatan terhadap Peraturan dan pengelolaan anggaran	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Implementasi
					c.	Pengendalian sistem manajemen pengelolaan keuangan	Pelaksanaan anggaran sesuai aturan, dan berbasis kinerja					
							Peningkatan pengelolaan & pemanfaatan <i>Idle cash</i> dan asset lancar lainnya	50%	60%	75%	75%	75%

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
		3	Penguatan kemandirian pendanaan melalui pemberdayaan Pengembangan Unit Usaha Bisnis (P2B)	a . Transformasi unit usaha menjadi professional & berkemampuan memberikan kontribusi yang meningkat secara berkelanjutan bagi kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.	Peningkatan kapasitas <i>Strategic Business Unit</i> dalam meningkatkan pendapatan dari kegiatan komersial & non komersial	44%	50%	55%	50%	55%
					Pemanfaatan Aset Tetap untuk meningkatkan pendapatan PNBPN BLU					
					Meningkatnya jumlah unit bisnis di bidang pendidikan	30%	40%	50%	40%	50%
					Meningkatnya kontribusi unit bisnis dalam penguatan anggaran UIN	5%	6%	7%	6%	7%



					c.	Peningkatan Kualitas SDM Perencana	Bertambahnya Tenaga Perencana berkualitas	5%	5%	5%	5%	5%

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
			d.	Diklat Fungsional Perencana	Meningkatnya kualitas Tenaga Perencana Terampil	5%	10%	30%	10%	30%
			e.	Pembuatan Master Plan Kampus II	Tersusunnya Master Plan Kampus II sebagai acuan dalam pembangunan fisik	60%	65%	70%	65%	70%
			f.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan (RIP) II Universitas	Tersusunnya RIP Tahap II Universitas sebagai acuan dalam pengembangan kampus jangka waktu 25 tahun	5%	10%	15%	10%	15%

				g.	Penyusunan Data dan Laporan	Tersajinya data dan Laporan Kegiatan yang lengkap dan akurat	60%	65%	70%	65%	70%
5	Kebijakan Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan bermutu yang sesuai standar Perguruan Tinggi	1	Pengembangan Manajemen Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	a.	Penyusunan Pemetaan Kebutuhan Prasarana dan Sarana berdasarkan Standar Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi	Tersedianya Peta Kebutuhan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
				b.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Tersedianya Rencana Induk Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi

					c.	Perumusan SOP, Penyediaan, Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Tersusunnya SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
						Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Tersusunnya SOP Penggunaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pendidikan	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
				Tersusunnya SOP Inventarisasi dan Pemutakhiran Nilai Aset Prasarana dan Sarana Pendidikan	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	
			d. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Tingkat Universitas	Terbentuknya Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan didukung dengan SDM yang mumpuni	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	
		2	a. Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Akademik Umum yang bermutu dan sesuai dengan standar	Peningkatan Ketersediaan lahan dan Bangunan di Luar Kampus UIN Alauddin Makassar	Persentase Luas lahan Hijau terhadap luas Keseluruhan Lahan Universitas	40%	50%	60%	50%	60%
				Persentase Luas Lahan Efektif dan Produktif terhadap Luas Keseluruhan Lahan	25%	30%	35%	30%	35%	

					pendidikan tinggi		Persentase Luas Lahan Efektif dan produktif terhadap Mahasiswa (m ²)	45	50	50	50	50
					b. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Proses Belajar Mengajar		Rasio Luas Ruang Kuliah terhadap Mahasiswa (m ²)	0.5	1	1.5	1	1.5
							Persentase Ruang Kuliah dengan Perlengkapan Meubeler	70%	80%	90%	80%	90%
							Persentase Ruang Kuliah dengan Media Pembelajaran	10%	20%	30%	20%	30%
							Ketersediaan Sistem Audio pada Ruang <i>Lecture Training</i>	80%	100%	100%	100%	100%
					c. Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana		Rasio Luas Ruang Perpustakaan terhadap civitas Akademika (m ²)	0.16	1	2	1	2

[Type here]



					Perpustakaan	Rasio Jumlah Judul referensi yang <i>up to date</i>	1:03	1:04	1:07	1:04	1:07
--	--	--	--	--	--------------	---	------	------	------	------	------

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN					
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019	
				Memiliki konektivitas Database Karya Ilmiah Online	1	2	3	2	3	
				Tersedianya <i>Research Corner</i> Mahasiswa	10%	20%	30%	20%	30%	
			d.	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi	Rasio Komputer dengan <i>Software</i> dan <i>Hardware</i> yang <i>up to date</i> pada area universitas terhadap civitas Akademika	1,500	1,400	1,500	1,400	1,500
				Tersedianya <i>Access Point</i> pada Area Strategis dalam Kampus	100	200	300	200	300	
				Rasio <i>Access Point</i> terhadap Total Civitas Akademika	1,500	1,400	1,500	1,400	1,500	

[Type here]

				e.	Pengembangan Sistem Pembelajaran Berbasis IT	Tersedianya Sistem Pembelajaran Berbasis IT (<i>E-Learning</i>)	Persiapan	Pengembangan	Impelementasi	Pengembangan	Impelementasi
				f.	Peningkatan Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dosen	Tersedianya Ruang Kerja setiap orang Dosen	2m ²	3m ²	4m ²	3m ²	4m ²
						Persentase Ruang Dosen Memenuhi Standar Rasio Luas Ruang Dosen Terhadap Jumlah Dosen per-jurusan/program Studi	10%	20%	30%	20%	30%
						Tersedianya Fasilitas Ruang Dosen	10%	20%	30%	20%	30%
		3	Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana akademik profesi khusus yang bermutu	a.	Peningkatan Kualitas Laboratorium /Bengkel/Tempat Praktik	Tersedianya Laboratorium/ Bengkel/Tempat Praktik yang up to date dan memenuhi standar kerja dan keselamatan kerja	60%	70%	80%	70%	80%

	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN				
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019
				Tersedianya <i>Teaching Hospital</i> yang memenuhi standar	Perencanaan	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
			b	Peningkatan Kualitas Laboratorium pada program Studi Rumpun Ilmu Keagamaan	1,5M ²	2m ²	2m ²	2m ²	2m ²
				Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang up to date dan memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja	60%	70%	80%	80%	80%
			c.	Peningkatan kualitas Laboratorium pada Program Studi Rumpun Ilmu Sosial dan Rumpun	1,5M ²	2m ²	2m ²	2m ²	2m ²
				Tersedianya Fasilitas Laboratorium yang up to date dan memenuhi standar	60%	70%	80%	80%	80%

[Type here]

KELOMPOK KEBIJAKAN	KEBIJAKAN	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR	TARGET CAPAIAN						
		PROGRAM	KEGIATAN		2015	2016	2017	2018	2019		
		4	Peningkatan Kualitas Prasarana dan Sarana Penunjang yang Bermutu	a.	Pengembangan Asrama/Mahad Mahasiswa	Persentase ketersediaan Fasilitas Asrama/Mahad Mahasiswa	10%	15%	20%	15%	20%
				b.	Pengembangan Apartemen Karyawan dan Dosen	Persentase Jumlah Apartemen dengan Karyawan dan Dosen	N.A	10%	20%	10%	20%
				c.	Pengembangan <i>Book Store</i> dan <i>Souvenir Center</i>	Tersedianya <i>Book Store</i> dan <i>Souvenir Center</i>	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
				d.	Pengembangan Fasilitas Olahraga dan Seni dengan Standar Nasional/ Internasional	Tersedianya Fasilitas Olahraga dan Seni dengan Standar Nasional/ Internasional	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi

					e.	Pengembangan Fasilitas Transportasi Internal Kampus	Tersedianya Fasilitas Transportasi Internal Kampus yang memenuhi standar	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
					f.	Pengembangan Pusat Kegiatan Mahasiswa	Peningkatan Efektifitas dan Produktifitas Pusat Kegiatan Mahasiswa	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
							Rasio Kuantitas Kegiatan Kajian dan Pengembangan Nalar Mahasiswa	Persiapan	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi	Impelementasi
					g.	Pengembangan Tempat Parkir Kendaraan	Persentase Jumlah Kendaraan dengan Tempat Parkir yang memenuhi standar	60%	70%	100%	70%	100%